

EDISI 12 JANUARI-MEI 2016

GRATIS

COKELAT

The advancement of communication

Memastikan Keberlanjutan
Kakao dengan Kebun
Penyambungan

CERITA SUKSES

Nota Kesepahaman Bersama
Program Kolaborasi
Cocoa Economic Cluster
Partnership - CEPAT

KEGIATAN ANGGOTA

**BERSINERGI DAN
BERMITRA MENUJU
KAKAO BERKELANJUTAN
INDONESIA**

LAPORAN UTAMA



CATATAN *editor*

SEBAGAI tujuan bersama para pemangku kepentingan di sektor kakao, Cocoa Sustainability Partnership memainkan peran yang signifikan dalam menghimpun dan membangun koordinasi dan komunikasi antar lini untuk menciptakan kakao berkelanjutan di Indonesia. Tugas besar tersebut kemudian diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung dari hulu hingga hilir, dari sektor pengambilan keputusan hingga ke forum-forum pekebun kakao yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.

Oleh karenanya, untuk mengantar kita semua ke sektor kakao Indonesia yang berkelanjutan, dan untuk memberikan gambaran umum, maka dalam edisi COKELAT ini isu besar tersebut akan diurai dalam tiga bagian utama. Dan edisi awal tahun ini, para pemangku kepentingan di sektor kakao dimintai pendapatnya tentang seperti apa Pertanian Berkelanjutan itu, atau Produksi Berkelanjutan, untuk kakao Indonesia. Dan kemudian di edisi-edisi berikutnya akan menguraikan bagian-bagian yang membangun isu keberlanjutan itu sendiri.

Harapan kami, dengan pembahasan di COKELAT ini, akan memberikan wawasan dan gambaran tentang kondisi kakao berkelanjutan Indonesia bagi kita semua yang menyelaraskan langkah bersama.

Selamat membaca.

COKELAT

The advancement of communication

PENANGGUNG JAWAB

Rini Indrayanti

PEMIMPIN REDAKSI

Armin Hari

EDITOR

Toha Arifin

ALIH BAHASA

Hamsani Hambali

TATA LETAK

di5ketch Studio, Makassar

KONTRIBUTOR

Ir. Dwi Praptomo Sudjatmiko, MS.

Fitrian Ardiansyah

Ina A. Murwani

Dr. Rino A. Sa'danoer

KANTOR EKSEKUTIF:

Cocoa Sustainability Partnership (CSP)

Gedung Graha Pena, Lantai 8, Suite 804-805

Jalan Urip Sumoharjo No. 20, Makassar

Tel./Fax.: +62 411 436 020

Email: communication@csp.or.id

www.csp.or.id

ANGGOTA CSP



Daftar Isi

- 24** Satelit BRI Perluas Layanan bagi UMKM dan KUR
- 28** Lokakarya Perencanaan Forum Kakao Daerah
- 29** Audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan Forum Petani Kakao Kabupaten Majene
- 30** Peningkatan Kapasitas Pelaporan di Forum Kakao Sumatera Barat
- 31** Berbagi Pembelajaran: Kegiatan dan Agenda Forum Kakao Daerah
- 32** World Cocoa Foundation: Komitmen terhadap Masyarakat Pekebun Kakao
- 35** Pertemuan Koordinasi Pemetaan Klon Kakao
- 35** GA Meeting: Kolaborasi Publik-Swasta untuk Kakao Berkelaanjutan Indonesia

LAPORAN UTAMA

- 06** Mewujudkan Kakao Berkelaanjutan di Indonesia
- 10** Membangun Sektor Kakao yang Berkelaanjutan
- 14** Bersinergi dan Bermitra Menuju Kakao Berkelaanjutan Indonesia

ENGLISH SECTION

- 40** Creating Cocoa Sustainability In Indonesia
- 44** Developing Sustainable Cocoa
- 48** Synergy and Partnership towards Sustainable Indonesian Cocoa
- 56** Ensuring Cocoa Sustainability with Grafting Nursery
- 58** BRI Satelite Expand Services for UMKM (Small and Medium Enterprises) and KUR (Micro Credit)
- 60** World Cocoa Foundation: Commitment on Cocoa Farmers Communities
- 62** Cocoa Forum Regional Planning Workshop
- 63** Hearings with Majene District Government and the Cocoa Farmers Forum of Majene District
- 64** A visit to the Nagekeo District, Nusa Tenggara Timur together with Yayasan Sahabat Cipta
- 64** Increasing the Reporting Capacity in Cocoa Forum of West Sumatra
- 65** Sharing Learning: Cocoa Forum Regional Activities and Agenda



22 CERITA SUKSES
Memastikan
Keberlanjutan Kakao
dengan Kebun
Penyambungan.



26 Kiai Bertanam
Kakao



30 Kunjungan ke
Kabupaten
Nagekeo



34 Lokakarya
Konsolidasi
Gugus Tugas



36 Nota Kesepahaman Bersama
Program Kolaborasi CEPAT



BAHASA INDONESIA

6

Mewujudkan Kakao
Berkelanjutan di
Indonesia

10

Membangun
Sektor Kakao Yang
Berkelanjutan

14

Bersinergi Dan Bermitra
Menuju Kakao
Berkelanjutan
Indonesia

22

Cerita Sukses

24

Satelit BRI Perluas
Layanan Bagi UMKM
dan KUR



26

KIAT Bertanam
Kakao

28

Cocoa Forum Update

32

World Cocoa Foundation

34

Kegiatan Anggota



MEWUJUDKAN KAKAO BERKELANJUTAN DI INDONESIA

SEKILAS PERTANIAN BERKELANJUTAN

DEWASA ini, sektor pertanian, atau perkebunan, telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dan dramatis semenjak akhir era Perang Dunia II yang mempertihatkan produksi makanan dan serat menjadi melonjak tinggi karena penggunaan teknologi baru, mekanisasi di segala lini, peningkatan penggunaan bahan kimia, spesialisasi, dan kebijakan pemerintah yang sangat mementingkan maksimalisasi produksi. Perubahan-perubahan tersebut kemudian yang menjadikan hanya sedikit petani yang tersedia, dengan tenaga kerja yang semakin berkurang, diwajibkan untuk memproduksi sebagian besar makanan dan serat di beberapa belahan dunia.

Meskipun perubahan-perubahan tersebut memberikan keuntungan dan efek positif dengan mengurangi risiko yang bisa dihadapi petani, namun tentu saja tetap ada nilai negatif yang muncul. Sebagian besar dari sisi negatif dari akselerasi sektor pertanian ini misalnya saja persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hal penipisan lapisan atas tanah, pencemaran air tanah, penurunan lahan pertanian keluarga, mengabaikan kondisi hidup dan kerja para buruh tani, peningkatan biaya produksi, disintegrasi kondisi perekonomian dan sosial di masyarakat perdesaan.

Menanggapi hal tersebut, semua gerakan mulai berkembang dan muncul selama dua dekade terakhir ini yang mempertanyakan peran dan upaya sektor pertanian dalam mempromosikan praktik-praktik yang berkontribusi terhadap permasalahan-permasalahan sosial tersebut. Semenjak tahun 1994, ketika edisi pertama Special Reference Brief yang disusun dan dikeluarkan oleh Perpustakaan Pertanian Nasional, Departemen Pertanian, Amerika Serikat (USDA), kata “keberlanjutan” kemudian menjadi sebuah istilah yang akrab di telinga. Tujuan untuk menciptakan sebuah planet yang lebih berkelanjutan yang tentu saja akan mengakomodasi kebutuhan mendasar penduduk di masa sekarang, dan sekaligus sembari menjaga sumberdaya yang ada sekarang ini agar memungkinkan para generasi mendatang punya kesempatan merasakan semua itu, mulai memperoleh penerimaan di masyarakat luas. Sejak itu kemudian pertanian berkelanjutan, dan/atau produksi berkelanjutan, mulai diarahkan oleh masyarakat-masyarakat pertanian secara signifikan.

Istilah “pertanian berkelanjutan” tentu saja menuai beberapa sanggahan. Misalnya saja pernyataan bahwa dalam dunia yang berkembang dengan cepat dan berubah drastis ini, apakah ada sesuatu yang bisa dikatakan berkelanjutan? Dan berbagai

kontradiksi lainnya. Dengan perdebatan tersebut, ada baiknya jika kita menengok sejenak kondisi sistem produksi pangan yang kita miliki sekarang ini, dan kemudian melakukan evaluasi untuk memberikan penggambaran tentang kondisinya di masa mendatang.

Kata "berkelanjutan" adalah alih-bahasa dan berasal dari Bahasa Inggris, yakni "*sustain*" dan disarikan dari Bahasa Yunani, "*sustinere*" (*sus-*, dari bawah, dan *-tenere*, menahan atau mempertahankan), jadi, bisa diartikan sebagai sebuah upaya untuk mempertahankan dan untuk tetap eksistensi dengan dukungan jangka panjang atau tetap. Jika dikaitkan dengan pertanian, maka istilah "berkelanjutan" menggambarkan tentang sistem pertanian yang mampu mempertahankan produktivitasnya, dan tentu saja memiliki sisi manfaat bagi masyarakat sekitar. Sistem pertanian tersebut haruslah memiliki faktor dan unsur konservasi sumberdaya, sosial, mendukung, komersial, kompetitif, dan bersahabat dengan lingkungan.¹

KONSEP PERTANIAN BERKELANJUTAN

Pertanian berkelanjutan mengintegrasikan tiga tujuan utama, yakni kesehatan lingkungan, profitabilitas ekonomi, dan keadilan sosial dan ekonomi. Beragam filosofi, kebijakan, dan praktik telah memberikan kontribusi yang nyata pada tujuan ini, dan orang-orang dari berbagai kapasitas berbeda, mulai dari petani hingga konsumen, telah menyepakati dan berbagi visi ini dan juga memberikan kontribusi masing-masing. Orang-orang di berbagai kapasitas yang berbeda, dari petani ke konsumen, telah berbagi visi ini dan memberikan kontribusi untuk itu.

Mengingat bahwa isu keberlanjutan pada prinsipnya bahwa kita harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang

untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri nantinya. Berlandaskan hal tersebut kemudian, sehingga kita tiba di sebuah kesimpulan besar bahwa dalam keberlanjutan, perlindungan dan pertanggung jawaban terhadap sumber daya alam dan manusia adalah hal yang terpenting. Pengelolaan sumber daya manusia mencakup pertimbangan tentang tanggung jawab sosial seperti kondisi kerja dan kehidupan para pekerja, kebutuhan masyarakat perdesaan, dan kesehatan dan keselamatan konsumen baik di masa sekarang maupun di masa depan. Sedangkan tanggung jawab terhadap sumber daya tanah dan alam adalah upaya untuk mempertahankan mempertahankan atau meningkatkan basis sumber daya vital ini untuk jangka panjang.

Membuat transisi ke pertanian berkelanjutan adalah sebuah proses. Namun bagi petani, transisi tersebut sepertinya membutuhkan serangkaian langkah-langkah kecil yang realistik. Kondisi perekonomian keluarga dan tujuan personal akan mempengaruhi seberapa cepat atau seberapa jauh proses perubahan tersebut. Hal yang harus diingat adalah bahwa bahkan setiap pengambilan keputusan yang kecil pun bisa membuat perbedaan dan memberikan kontribusi untuk mempercepat keseluruhan sistem lebih lanjut dalam "pertanian berkelanjutan." Hal lain yang harus diperhatikan bahwa untuk mencapai ke arah tujuan pertanian berkelanjutan merupakan tanggung jawab semua orang di dalam sistem yang berjalan tersebut, termasuk petani, buruh, pembuat kebijakan, peneliti, pembeli, dan konsumen. Setiap kelompok masyarakat memiliki bagian sendiri untuk bermain beserta kontribusi yang unik dalam menguatkan komunitas pertanian berkelanjutan.

Untuk memperjelas fokus arah pencapaian target tersebut, ada beberapa strategi khusus yang telah dikelompokkan menurut tiga wilayah yang berbeda namun sebenarnya adalah satu ikatan yang tidak bisa dicerai beraikan. Kelompok strategi khusus tersebut adalah sebagai

berikut (1). Pertanian dan Sumber Daya Alam; (2). Praktek Produksi Tanaman dan Ternak; dan (3). Konteks Ekonomi, Sosial, Politik.

MANFAAT PERTANIAN BERKELANJUTAN

Pertanian berkelanjutan adalah upaya dalam produksi makanan, serat, atau tanaman atau produk hewan lainnya yang menggunakan teknik pertanian yang melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, komunitas manusia, dan kesejahteraan hewan. Bentuk pertanian seperti ini memungkinkan kita untuk menghasilkan makanan sehat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk melakukan hal yang sama.

Manfaat utama dari pertanian berkelanjutan adalah:

1. Pelestarian Lingkungan

Dalam memproduksi produk tanaman dan hewan, sistem pertanian berkelanjutan akan melakukan upayanya tanpa bergantung pada pestisida kimia, pupuk sintetis, benih hasil rekayasa genetika, atau praktik yang menurunkan kondisi tanah, air, atau sumber daya alam lainnya. Konsep pertanian ini lebih mengutamakan penanaman berbagai jenis tanaman dan menggunakan beragam teknik seperti rotasi tanaman, konservasi tanah, dan peternakan berbasis berbasis padang rumput. Sistem pertanian berkelanjutan melindungi keanekaragaman hayati dan mendorong perkembangan dan pemeliharaan ekosistem yang sehat.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Produksi pangan seharusnya tidak pernah tiba pada urusan pengorbanan kesehatan manusia. Karena lahan pertanian yang menerapkan konsep pertanian berkelanjutan menghindari penggunaan pestisida berbahaya, hasil tanaman mereka menghasilkan buah-buahan dan sayuran yang lebih aman bagi konsumen, pekerja, dan masyarakat sekitar. Demikian juga peternak yang menerapkan peternakan berkelanjutan yang memelihara hewan tanpa praktik berbahaya seperti penggunaan antibiotik nonterapitis, atau perang-

¹ John Ikerd, seperti yang dikutip oleh Richard Duesterhaus di "Sustainability's Promise," Jurnal Soil and Water Conservation (Jan-Feb 1990), 45(1): p.4



sang pertumbuhan yang mengandung arsenik. Melalui tatakelola yang berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap limbah ternak, peternak berkelanjutan juga melindungi manusia dari paparan patogen, racun, dan polutan berbahaya lainnya.

3. Mempertahankan Masyarakat yang Berdaya

Sebuah komponen penting dari pertanian berkelanjutan adalah kemampuannya untuk tetap ekonomis, dan di sisi lain tetap memberikan upah layak dengan kondisi bekerja yang adil mensejahterakan dan aman bagi para petani dan peternak, buruh tani, pengolah makanan, dan mereka yang bekerja dalam sistem produksi pangan. Sistem pertanian berkelanjutan juga mengangkat perekonomian lokal dan regional, menciptakan lapangan kerja yang baik, dan membangun komunitas yang kuat.

4. Penegakan Kesejahteraan Hewani

Petani, atau peternak, berkelanjutan memperlakukan hewan dengan hati-hati dan rasa hormat, dan dalam penerapan praktik-praktik peternakan yang melindungi kesehatan dan kesejahteraan

hewan. Dengan memelihara ternak di padang rumput, para petani ini memungkinkan hewan mereka untuk bergerak bebas, hidup dalam perilaku natural mereka, mengkonsumsi makanan alami, dan menghindari stres dan penyakit yang terkait dengan kurungan.

KAKAO BERKELANJUTAN INDONESIA

Produksi kakao yang berkelanjutan secara signifikan banyak memberikan pengaruh bagi masyarakat yang berada di negara-negara berkembang, dan sektor ini kira-kira mendukung penghidupan sekitar 40 hingga 50 juta masyarakat petani secara global. Tidak seperti dengan sektor agribisnis lainnya yang telah mengalami mekanisasi dan industriialisasi masif, secara umum sektor kakao masih dilahirkan dari lahan-lahan pertanian sempit yang dikelola oleh masyarakat petani kecil dengan akses terbatas terhadap sumber daya dan pasar tentu saja.

Melihat kenyataan tersebut kemudian, khususnya persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh produksi kakao secara global, para pelaku sektor publik dan swasta kian bersatu dan membangun

koordinasi dalam bentuk kemitraan untuk meluangkan dukungan dan keahlian yang mereka miliki guna meningkatkan dan mengembangkan perkebunan kakao yang lebih berkelanjutan dan kondisi perdagangan di masing-masing negara penghasil kakao. Misalnya saja dukungan World Cocoa Foundation (WCF) yang menerjemahkan upaya-upaya tersebut agar bisa menciptakan penghidupan yang lebih di tingkatkan perkebunan rakyat, peningkatan sumber daya dan investasi di tingkat pusat, dan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi para pekebun berskala kecil yang memainkan peran besar dalam menyediakan suplai bagi industri pengolahan cokelat agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen dunia.

Dengan melihat jumlah pekebun kakao berskala kecil di belahan negara-negara berkembang, jika dijumlahkan secara kasar, kira-kira ada 5 juta rumah tangga yang mengelola lahan kakao sebagai sumber penghasilan utama mereka, dan sebagian besar menghuni wilayah-wilayah tropis di Afrika Barat, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Misalnya saja di Afrika, sekitar 70% kakao yang dihasilkan

dari lahan-lahan pekebun kakao berskala kecil, dan menjadikan kakao ini sebagai penyumbang sekitar 60 hingga 90% sumber pendapatan rumah tangga mereka.

Tantangan yang dihadapi oleh pelaksanaan produksi, ataukah perkebunan, kakao yang berkelanjutan pun tidak sedikit dan ringan. Pekebun-pekebun yang berskala kecil memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya yang dibutuhkan dan pasar yang lebih terorganisir juga menjadi tantangan tersendiri dengan beragam persoalannya. Misalnya saja penurunan produksi biji kakao yang diakibatkan oleh hama dan penyakit, usia pohon yang kian menua dan tidak produktif, dan hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Hal lain yang menjadi persoalan penting bagi pekebun kakao berskala kecil tersebut adalah sulitnya akses yang dimiliki terhadap suplai perkebunan, tidak terlalu akrab dengan teknik-teknik perkebunan modern, dan hal terpenting adalah susahnya mereka dalam memperoleh bantuan perkreditan dan asuransi bagi pengelolaan kebun mereka. Selain itu pula, di sebagian besar wilayah perdesaan, khususnya di daerah Gurun Pasir Sahara Afrika, masyarakat yang dominan adalah pekebun kakao menghadapi beragam masalah sosial, misalnya rendahnya tingkat literasi orang dewasa, risiko kesehatan yang dihadapi, dan kurangnya akses bagi anak-anak mereka untuk bersekolah dengan layak. Oleh karenanya, faktor-faktor tersebut berarti bahwa sebenarnya keberlangsungan dan produksi sektor kakao untuk jangka panjang dewasa ini patut dikuatirkan.

Menanggapi hal tersebut kemudian, persoalan yang kompleks di sektor kakao sangat beragam, berserakan, dan besar sekali untuk bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Namun ketika para pemangku kepentingan bergabung dan membangun kemitraan, pengetahuan dan komitmen dari masing-masing pihak bisa dimaksimalkan dan akan memberikan manfaat

bagi para pekebun kakao dan keluarganya. Pilihan bergabungnya beberapa industri dan perusahaan hulu hingga hilir di sektor kakao dalam kemitraan tersebut tentunya tanpa dasar pertimbangan yang mendalam. Para pelaku usaha tersebut melihat pentingnya untuk bergabung dan berorganisasi dalam rangka melakukan investasi dalam mencoba mencari jalan keluar dari tantangan yang dihadapi pihak industri. Misalnya saja beberapa perusahaan cokelat secara kolektif telah melakukan investasi sosialnya dalam sebuah program-program kemitraan regional yang dibangun melalui Cocoa Sustainability Partnership (CSP) guna memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan kakao di wilayah masing-masing

Pola kemitraan publik dan swasta tersebut merupakan jawaban atas segala persoalan yang dihadapi di sektor kakao, khususnya bagi pekebun berskala kecil dan keluarganya. Dengan dukungan dari anggota-anggotanya, kemitraan tersebut berfungsi untuk memastikan dalam melipatgandakan produksi dan produktivitas lahan-lahan kakao yang dimiliki oleh pekebun berskala kecil. Upaya tersebut ditempuh dengan cara meningkatkan efisiensi pemasaran, peningkatan produktivitas di lahan yang sedang dikelola, dan diversifikasi pendapatan. Hasil yang dira-

sa adalah bahwa para pekebun tersebut telah meningkatkan produksi dan produktivitas kakao mereka secara perlahan, dan telah mengelola perkebunan mereka sebagai bisnis. Di sisi lain adalah para pekebun kakao dan organisasi mereka telah mampu untuk terlibat secara aktif, langsung, dan professional dengan pihak pembeli dalam memperkuat hubungan perdagangan mereka.

Sebagai tambahan atas dukungan industri dan perusahaan cokelat dalam program tersebut secara umum, beberapa industri dan perusahaan tersebut beserta mitra rantai nilai mereka telah bergabung untuk bekerja langsung dengan kelompok pekebun kakao. Komitmen mereka adalah dengan melakukan investasi materi, waktu, dan pengetahuan guna meningkatkan kualitas biji kakao yang dihasilkan dan hubungan yang lebih professional dengan pekebun.

Tentu saja ada beberapa inisiatif yang sementara ini dilaksanakan oleh kemitraan yang dibangun oleh perusahaan, atau swasta, dengan pihak-pihak publik guna mewujudkan keberlanjutan kakao di Indonesia. Dan untuk mengetahuinya lebih lanjut, dalam beberapa artikel berikutnya dalam edisi ini akan membahas hal tersebut. ☺





MEMBANGUN SEKTOR KAKAO YANG BERKELANJUTAN

Fitrian Ardiansyah, Direktur IDH-Sustainable Trade Initiative

DALAM beberapa tahun terakhir, sektor kakao di dunia dan juga di Indonesia, telah berupaya bertransformasi menjadi lebih berkelanjutan, ramah lingkungan dan sosial sambil terus meningkatkan produktivitasnya. Tantangan terbesar dalam membangun sektor kakao menjadi lebih lestari di antaranya adalah mengembangkan model bisnis di tingkat petani, yang tidak hanya berfokus kepada peningkatan produktivitas, tetapi juga mendorong kewirausahaan petani dan pengelolaan koperasi sekaligus memasukkan unsur perlindungan lingkungan.

Dengan tingkat produksi kakao 350.000 ton per tahunnya (2014/2015), Indonesia saat ini menempati peringkat ke tiga di dunia. Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor terpenting untuk Indonesia. Komoditas ini juga penting bagi penduduk perdesaan dikarenakan mayoritas produksi kakao dihasilkan oleh petani kecil. Saat ini, Indonesia memiliki setidaknya 1,5 juta hektar luasan lahan yang ditanami dengan komoditas tanaman kakao, terutama di Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa Barat, Papua dan Kalimantan Timur. Dengan banyaknya produksi kakao yang dihasilkan oleh petani kecil, aspek keberlanjutan

atau kelestarian kakao tidak akan dapat dicapai tanpa melibatkan petani kecil.

Untuk menjamin kesuksesan dalam membangun sektor kakao yang berkelanjutan, harus dibarengi dengan upaya selain untuk mendorong pengembangan opsi penghidupan yang berkelanjutan bagi desa tempat petani kakao tersebut tinggal, sekaligus membantu petani dalam peningkatan kapasitas kewirausahaan. Tanpa inovasi yang membantu kapasitas petani (terutama dalam konteks peningkatan produktivitas, pengelolaan lahan yang lebih baik dan pendanaan organisasi petani atau koperasi) akan sulit menjamin keberlanjutan sektor kakao.

Selain itu, dikarenakan situasi pasar ekspor yang dewasa ini juga semakin meminta suatu komoditas untuk diproduksi dengan lebih memperhatikan unsur perlindungan sosial dan lingkungan, pengembangan kakao yang berkelanjutan di Indonesia harus mencakup aspek pengembangan masyarakat setempat, pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan dan malnutrisi, dan pengelolaan lahan yang tidak menimbulkan kebakaran lahan, degradasi lingkungan, dan deforestasi. Dalam merealisasikan sektor kakao yang berkelanjutan, pengembangan model atau proof-of-concepts yang digagas bersama oleh pelaku industri, organisasi nirlaba, kelompok petani, maupun pemerintah menjadi penting. Dikarenakan model tersebut diharapkan bisa direplikasi atau dikembangkan di skala yang lebih luas untuk menjamin cakupan konsep untuk sektor kakao berkelanjutan diadopsi oleh banyak pihak.

INOVASI DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN DAN PENDANAAN PETANI

Dibandingkan komoditas perkebunan lainnya, salah satu tantangan untuk mewujudkan sektor kakao berkelanjutan adalah rendahnya tingkat produktivitas tanaman kakao, terutama yang dihasilkan oleh petani dengan satuan per-



hektarnya. Dikarenakan hal tersebut, sejumlah besar petani kakao terjebak dalam siklus kemiskinan yang terus menerus dan dililit hutang yang signifikan. Input yang rendah yang kemudian menghasilkan output yang rendah (kuantitas dan kualitas), secara kronis menghambat pertumbuhan komoditas kakao. Skema untuk membantu petani dalam penyediaan input yang lebih baik, masih belum mempunyai standar yang sama.

Sedangkan, pendanaan untuk petani sendiri dalam mengelola lahan yang lebih baik seringkali tidak tersedia dengan alasan bahwa lembaga perbankan masih melihat tingginya risiko untuk membantu mereka dalam mengelola lahan, sehingga petani masih bergantung kepada pembebasan dana informal yang hanya memberikan dana terbatas dan dalam waktu singkat, dan tentunya dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Kondisi ini diperparah kemudian dengan usia tanaman yang

sudah tua dan semakin menua, ditambah dengan skema pendanaan untuk peremajaan dan rehabilitasi yang belum jelas bentuknya.

Walau begitu, sebenarnya ada beberapa inisiatif yang sudah dikembangkan di beberapa tempat untuk mengatasi siklus input rendah-output rendah tersebut. Sebagai contoh, bantuan dari perusahaan yang bertindak sebagai mitra petani yang kemudian bisa menjamin harga yang rendah dalam pembelian pupuk sangat membantu petani dalam kepastian input dari segi pemupukan. Pengembangan sertifikasi dan traceability (lacak balak dalam rantai pasokan) juga membantu memperkuat hubungan antara perusahaan/pembeli dan petani serta dapat membantu mengidentifikasi komponen-komponen di tingkat petani yang perlu diperkuat, termasuk dalam hal input. Skema pendanaan dan berbagi risiko dalam penyediaan pupuk dan penyewaan

truck, juga bisa didorong sebagai inovasi yang akan membantu kepastian input. Selain itu, sistem perbankan elektronik (mobile banking) juga terus digagas sebagai inovasi yang akan menempatkan petani sebagai pelaku yang bisa lebih dipercaya untuk mendapatkan bantuan dalam penyediaan input.

Untuk mencapai skala yang lebih luas dari inovasi-inovasi yang telah dilakukan, kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan (pemerintah setempat, perbankan setempat, dan internasional) menjadi penting. Kerjasama ini diperlukan terutama untuk menghasilkan berbagai skema pendanaan dengan jangka waktu menengah atau panjang yang

mendorong ketersediaan dukungan pendanaan dalam penyediaan input untuk lahan petani, kepemilikan atau penyewaan lahan, dan pembiayaan operasional lainnya. Agar pendekatan ini berhasil, terbentuknya dan efektifnya organisasi petani ataupun koperasi sangatlah penting. Tanpa adanya organisasi petani atau koperasi yang efektif, akan sulit bagi perbankan untuk menggelontorkan pendanaan dikarenakan risiko bagi skema pendanaan tersebut menjadi lebih tinggi jika disalurkan ke petani perseorangan.

Dalam rangka membantu petani serta organisasinya, ataupun koperasi, menjadi lebih bankable, pendampingan, dan pemberdayaan serta upaya peningkatan

kapasitas mereka merupakan keniscayaan. Petani dan organisasinya, diharapkan dapat diperkenalkan dengan modul-modul yang akan membantu mereka untuk mengelola keuangannya menjadi lebih efisien dan terpercaya. Tentunya, hal ini hanya bisa dicapai bila terdapat organisasi pendamping di tingkat lokal, yang bekerja sama dengan perbankan ataupun lembaga keuangan setempat, yang memang berpengalaman dalam pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan atau desa. Kerjasama semacam ini dapat menumbuhkan kepercayaan antara lembaga-lembaga tersebut dan petani dapat dengan mudah bertanya dan memperbaiki diri dan lembaganya. Pada



gilirannya, ketika petani dan organisasinya dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik, daya dan posisi negosiasi petani dengan pihak perbankan menjadi lebih besar dan kuat.

INOVASI DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK SOSIAL

Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan sektor kakao berkelanjutan adalah perlindungan sosial atau pemenuhan hak-hak masyarakat. Untuk Indonesia, komponen-komponen yang perlu diperhatikan di antaranya adalah pemberdayaan perempuan, peningkatan nutrisi, dan akses masyarakat kepada aktivitas di rantai pasok yang selama ini lebih banyak dikerjakan oleh industri. Konteks pemberdayaan perempuan menjadi strategis dikarenakan petani kakao banyak yang dipersepsi sebagai sektor yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini telah dianggap menghambat akses perempuan dalam penggunaan lahan dan sumberdaya yang berkaitan dengan lahan budidaya tersebut, dan tentunya pendanaan. Karenanya, berbagai inovasi diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan terlibat. Sebagai contoh, dalam pelatihan yang diberikan, porsi keterlibatan perempuan ditingkatkan, ataupun persentase pemberian kredit pertanian juga bagi petani perempuan. Ataupun hal lainnya yang bisa dicoba adalah dengan meningkatkan kapasitas perempuan untuk terlibat dalam upaya kewirausahaan komoditas kakao, dengan menjadi pemimpin di dalam organisasi petani ataupun koperasi.

Dalam konteks malnutrisi, ada beberapa terobosan yang perlu dilakukan. Kasus malnutrisi pada anak, gangguan pertumbuhan, dan sanitasi yang kurang dapat diatasi dengan mengombinasikan program produktivitas petani dengan peningkatan asupan gizi bagi keluarga dan anak. Salah satu model yang bisa diterapkan adalah dengan memperkenalkan penanaman tumbuhan yang berguna

bagi peningkatan gizi, pembelajaran mengenai gizi itu sendiri, dan perubahan komponen diet bagi petani dan keluarganya. Pengelolaan keuangan yang lebih baik tentunya akan membantu petani menyisihkan sebagian dananya untuk memenuhi asupan gizi bagi keluarganya.

INOVASI DALAM PENGELOLAAN LAHAN YANG LEBIH BAIK DAN PENCEGAHAN DEFORESTASI

Walau tidak seperti komoditas lainnya yang lebih ekspansif, aspek pencegahan degradasi lingkungan termasuk pencegahan deforestasi di sektor kakao sudah menjadi bagian integral yang diminta pelaku pasar. Pencegahan degradasi lingkungan dan deforestasi, hanya saja, melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, terutama dalam pengelolaan ruang dan lahan, yang cukup kompleks. Sebagian tantangannya juga berkaitan dengan baik atau buruknya tata pemerintahan di tempat komoditas kakao tersebut dikembangkan.

Di tempat lain, kakao juga bisa dianggap sebagai *buffer* (penyangga) yang pada gilirannya dapat melindungi hutan untuk tidak dijarah atau dikonversi menjadi komoditas lainnya. Namun, pengembangan komoditas kakao di kawasan penyangga tersebut haruslah produktif dan mempunyai nilai tambah sehingga petani kakao tidak melebarkan cakupan lahannya ke dalam hutan ataupun mengganti tanaman kakaonya menjadi tanaman lainnya yang lebih ekspansif.

Pengembangan model yang menyimbangkan peningkatan produktivitas sekaligus perlindungan hutan (*production-protection*) sangatlah relevan dengan kondisi Indonesia yang masih mempunyai banyak tutupan hutan yang masih asri. Petani kakao yang produktif dan peduli lingkungan, pada gilirannya dapat menjadi penjaga hutan yang sangat efektif. Jika model *production-protection* dikembangkan dengan konsep lainnya, semacam agroforestry, bisa jadi menarik

bagi investor non-konvensional. Investor tersebut misalnya dapat memberikan pendanaan karena adanya serapan karbon atau perlindungan keanekaragaman hayati, atau nilai tambah lainnya. Hal tersebut bisa dikategorikan sebagai penambahan pendapatan bagi petani.

Model semacam ini dapat secara efektif dikembangkan bila ada perencanaan di skala bentang alam (lanskap) yang tentunya memerlukan keterlibatan pemerintah setempat. Keterlibatan pelaku dari komoditas lain juga menjadi penting karena tujuan pengelolaan lanskap yang baik harus didukung oleh semua pelaku usaha, petani, dan pemerintah. Pendekatan lanskap ini juga dapat memberikan kestabilan ekonomi bagi daerah tersebut karena tidak hanya bergantung kepada satu komoditas, sekaligus sinergi pengembangan multi-komoditas dapat tercapai.

KESEIMBANGAN DALAM KEBERLANJUTAN

Dalam pembangunan sektor kakao yang berkelanjutan, secara jelas terlihat bahwa aspek peningkatan produktivitas sekaligus perlindungan sosial dan lingkungan perlu didorong secara seimbang. Keterlibatan pemangku kepentingan yang terkait juga penting dikarenakan hal ini dapat membantu menjamin realisasi komoditas kakao yang berkelanjutan di lapangan. Kemitraan dalam mengembangkan model perlu ditingkatkan lebih lanjut dalam skala yang lebih tinggi atau luas, semisal di tingkat lanskap. Indonesia, sebagai negara produsen kakao ke tiga terbesar di dunia, mempunyai kesempatan melakukan transformasi di sektor kakao, yang tentunya hanya bisa dilakukan bila inovasi-inovasi dan model-model yang disebutkan sebelumnya bisa terus dikembangkan dan yang terpenting diterapkan di sentra kakao di seluruh nusantara. ☺



BERSINERGI DAN BERMITRA MENUJU KAKAO BERKELANJUTAN INDONESIA

SEPERTI yang diuraikan sebelumnya, proses menuju sektor kakao berkelanjutan di Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak pranata yang harus dipersiapkan guna mengantar pekebun kakao Indonesia ke sektor komoditas yang lebih berkelanjutan. Konsep berkelanjutan ini didasarkan dari keresahan para pemangku kepentingan melihat kondisi sektor kakao kita selama ini. Di satu sisi, pekebun kakao diharapkan mampu melipat gandakan produksi dan produktivitas sembari meningkatkan kualitas biji kakao, dan mulai memikirkan bagaimana kakao yang dirawat sepenuh hati bisa dinikmati

oleh generasi mendatang.

Persoalan yang dihadapi pekebun kakao di Indonesia pun tidak sederhana dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Masalah penurunan kualitas dan kesuburan tanah, rendahnya produksi dan produktivitas kakao, dan kurangnya akses terhadap permodalan, pupuk yang terjangkau, dan bahan tanam yang berkualitas menjadi momok dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas, dan perbaikan kualitas biji kakao. Peta jalan kakao berkelanjutan pun diperbaharui dan dipermantap penerapannya bagi semua pemangku kepentingan



semua pemangku kepentingan di sektor kakao, mulai dari hilir hingga hulu, untuk mendiskusikan tentang Kakao Berkelanjutan Indonesia.

PERANAN LEMBAGA PEMERINTAH: PENYEDIA FUNGSI REGULASI DAN FASILITASI

Secara umum, fungsi dan peranan lembaga kepemerintahan adalah untuk menyediakan regulasi dan memberikan fasilitasi secara umum kepada semua pemangku kepentingan di sektor kakao, dan keberpihakannya tetap berfokus kepada kepentingan pekebun kakao di seluruh Indonesia. Mengingat bahwa kakao adalah salah satu komoditas penting di Indonesia dan secara global, maka pemerintah harus memainkan dua peranan tersebut secara menyeluruh dan menyentuh semua kepentingan, khususnya bagi pekebun kakao berskala kecil yang paling banyak menggantungkan kehidupannya di sektor perkebunan ini. Salah satu regulasi dieluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, adalah Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao, disingkat Gernas Kakao, yang telah dilaksanakan semenjak tahun 2009 hingga kini. Pada awal penerapannya, program nasional tersebut menyangkai di 9 provinsi dan 40 kabupaten/kota yang merupakan sentra penghasil kakao nasional, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 provinsi di tahun 2011. Di tahun 2015, program Kementerian Pertanian tersebut berubah nama menjadi Program Pengembangan Kakao Berkelanjutan.

Pada periode 2009-2011, kegiatan utama Gernas Kakao meliputi Kegiatan Peremajaan Tanaman pada lahan seluas 70.000 hektar, Kegiatan Rehabilitasi Tanaman seluas 235.000 hektar, dan Kegiatan Intensifikasi Tanaman di 145.000 hektar. Ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan di kantong-kantong utama produksi kakao di Indonesia. Sedangkan untuk Program Pengembangan Kakao Berkelanjutan (PPKB) yang dimulai pe-

di sektor kakao. Para pemangku kepentingan tersebut bersepakat bahwa di tahun 2020 nanti target dan mimpi besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara penghasil kakao terbesar di dunia yang selama ini baru menduduki posisi ke tiga, mengalahkan Pantai Gading dan Ghana, serta mencapai kondisi kakao berkelanjutan di Indonesia harus tercipta. Dan satu-satunya cara yang bisa

mewujudkan hal tersebut adalah para pemangku kepentingan tersebut, mulai pihak pemerintah, industri dan perusahaan pengolahan, lembaga sosial kemasarakatan, hingga pekebun kakao, harus membangun sinergisitas, komunikasi, dan kemitraan.

Melihat hal tersebut, Tim Redaksi COKELAT pun menghimpun beberapa pendapat dan penerapan kerjasama dari

laksanaannya pada tahun 2014, akan menyisir daerah-daerah yang selama ini menjadi sentra penghasil kakao nusantara yang tersebar di Sulawesi, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur, yang kemudian dikembangkan lagi ke beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Target pelaksanaannya adalah bagaimana mengupayakan peningkatan produksi dan produktivitas kakao dari rata-rata 200 kilogram per hektar menjadi 600 kilogram per hektar untuk sekali panen, dan nantinya akan bisa mencapai 1,2 ton per hektar, dengan total lahan yang akan dilakukan intervensi adalah 1,7 juta hektar.

Kegiatan utama program pengembangan dari Gernas Kakao ini dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Pengembangan Kakao Berkelanjutan. Pengembangan kakao rakyat dengan sumber dana APBN dengan bantuan bibit unggul bermutu, pupuk, obat-obatan, dengan kegiatan berupa perluasan lahan, peremajaan tanaman, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman, intercropping tanaman kakao dengan kelapa, pemberdayaan petani, dan peningkatan mutu,
2. Pengembangan Revitalisasi Kakao. Upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman dengan pembiayaan melalui kredit perbankan (KPEN-RP) dengan subsidi bunga dari pemerintah,

3. Pengembangan Integrasi Kakao dan Ternak. Usaha tani terpadu kakao dan ternak melalui pemanfaatan limbah tanaman (sebagai pakan) dan limbah ternak (sebagai pupuk). Kegiatan ini meliputi bantuan kepada kelompok tani berupa ternak (sapi/kerbau/kambing) dan 1 set alat pengolah limbah (alat pencacah dan alat penepung kulit buah kakao), dan
4. Pengembangan melalui APBD. Pengembangan kakao rakyat dengan sumber dana dari APBD Provinsi dan Kabupaten.

Hal lain yang ditekankan dalam penerapan program nasional tersebut adalah bagaimana pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi ke masyarakat, dan sekaligus memberikan dukungan terhadap industri kakao, terutama yang berdampak langsung terhadap pekebun kakao berskala kecil.

Di sektor pertanian dan perkebunan sendiri, makna dan kedudukan istilah berkelanjutan sangatlah penting, karena menyangkut sistem mata pencaharian masyarakat pekebun kakao berskala kecil. Untuk kakao sendiri, pemerintah melalui program-programnya, seperti PPKB misalnya, telah menyiapkan penganggaran dan pendampingan untuk membangun perkebunan rakyat.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Dwi Prap-

tomo Sudjatmiko, MS. mengungkapkan bahwa inti dari Program Pengembangan Kakao Berkelanjutan ini adalah tidak sekadar melakukan pengembangan di sektor produksi (hulu), tapi juga hingga pada sektor pengolahan (hilir), yang semuanya mengarah pada upaya peningkatan pendapatan petani. Hal lain yang dititikberatkan oleh program ini adalah penguatan kelembagaan petani dan pemberian pasar. Dan semua ini adalah rangkaian dalam menuju kakao berkelanjutan Indonesia, dengan alasan bahwa jika penjangkauan hanya pada sektor hulu saja, tidak menjangkau hingga hilir, maka tidak bisa dikatakan sebagai hal yang berkelanjutan, karena hanya menyentuh sebagian saja.

Selain regulasi dan fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah, Ditjenbun juga menyediakan bantuan alat pertanian ke kelompok pekebun kakao, mulai dari kegiatan persiapan lahan hingga pengolahan biji kakao dengan teknologi sederhana dan berbentuk industri rumah tangga. Sedangkan untuk persoalan harga dan pasar, pemerintah belum bisa berbuat banyak karena belum ada acuan regulasi yang bisa diterapkan dan diberlakukan secara nasional.

Sedangkan untuk isu kesehatan dan pelestarian lingkungan, selama ini pemerintah memperhatikan bahwa di lapangan tidak terlalu banyak persoalan yang dihadapi. Kemungkinan besar hanya sistem pertanian organik yang akan menjadi pilihan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pemerintah sendiri juga mengimbau kepada petani untuk menggunakan pestisida non kimia dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan mengembang biakkan musuh alami, perangkap hama, dan pengolahan kotoran hewan ternak menjadi pupuk organik atau pupuk kandang. Semua upaya tersebut selain untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan juga untuk meningkatkan produksi dan produktivitas





kakao petani.

Pengembangan kakao rakyat ini tidak bisa lepas dari dukungan pendanaan dari pemerintah, meskipun dalam skema dukungan yang masih sedikit. Dibandingkan dengan komoditas lainnya, jumlah anggaran untuk sektor kakao masih lumayan besar, hanya saja karena lokasi programnya luas dan banyak, maka yang dilihat hanya jumlahnya saja yang kecil. Hal yang menjadi persoalan adalah secara rata-rata masa pendampingan dan pemeringkatan kepada petani adalah

minimal 3 tahun, padahal program yang dilaksanakan hanya beberapa tahun saja, dan setelah itu terpotong. Persoalan produksi kakao di lahan perkebunan rakyat juga masih menjadi kendala. Hingga saat ini, capaianya baru sekitar 800 kilogram per hektar padahal kita sudah harus mencapai angka 1,2 ton per hektar.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana petani kakao berskala kecil mampu mencapai nilai tersebut? Mau tidak mau, segala pihak pemegang kepentingan harus bahu membahu dalam

memperbaiki akses petani terhadap permodalan, agro-input yang terjangkau dan tersedia, dan bahan tanam yang berkualitas. Pemerintah juga harus mendorong para penyuluhan di lapangan untuk bergerak dan bersikap pro-aktif dalam membantu dan menggerakkan pekebun kakao dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Untuk gairah dalam mengelola tanaman kakao, terutama bagaimana menarik minat pemuda untuk terjun ke sektor perkebunan ini, juga merupakan



tantangan lain yang dihadapi. Stigma tentang perkebunan dan pertanian di desa-desa itu mempengaruhi mereka yang ingin bekerja di sektor tersebut akan memilih jalan lain. Pemerintah sendiri memiliki bayangan untuk menarik kembali anak-anak muda agar mau berkebun, atau bertani, dengan cara melakukan mekanisasi pertanian dan pengembangan industri hilirnya. Produk akhir kakao berupa makanan dan minuman cokelat tentunya masih memiliki pamor bagi anak muda jika mereka serius ingin menggarap sektor ini. Industri rumah tangga pengolahan cokelat juga bisa menjadi cahaya baru kebangkitan di sektor kakao. Karena selain masyarakatnya menanam dan memproduksi kakao di lahan-lahan mereka, di rumah-rumah juga tersedia teknologi sederhana pengolahan cokelat hingga membuat produk cokelat jadi yang menarik.

PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANG TIGA TUGAS UTAMA DALAM AKSELERASI PENCAPAIAN KAKAO BERKELANJUTAN INDONESIA

Perguruan tinggi seharusnya memiliki potensi dalam mempengaruhi kalangan luas mengenai isu keberlanjutan dalam beberapa mekanisme. Pertama, perguruan tinggi selalu dianggap pihak yang netral karena ia adalah sumber pengetahuan multi disiplin. Pengetahuan multi disiplin ini selalu dijaga agar tetap berada dalam koridor keilmuan yang objektif. Selain itu juga ketersediaan multi disiplin ilmu dapat membantu dalam melakukan kajian menyangkut permasalahan pengelolaan program kakao berkelanjutan, dan sekaligus dapat mengembangkan pemecahan masalah tersebut. Bukan hanya dari segi teknik, namun juga dari segi sosial yang masih kurang digali selama ini. Faktor teknologi, baik teknologi pertanian maupun teknologi informasi dan komputasi, dalam hal ini kemajuan teknologi digital, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan program kakao berkelanjutan.

Pendalamannya perilaku konsumen terhadap produk cokelat pun dapat dilakukan oleh pihak perguruan tinggi ini.

Kedua, perguruan tinggi merupakan pusat penyedia dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transisi praktik keberlanjutan ini, khususnya di sektor kakao. Mahasiswa dengan profil Generasi Y yang memiliki salah satu karakter yaitu sensitif terhadap masalah social akan mampu membantu akselerasi pencapaian keberlanjutan di sektor kakao Indonesia. Diperkenalkannya social entrepreneurship dalam mata kuliah, seharusnya bisa membuat topik keberlanjutan lebih mudah dimengerti dan menarik mahasiswa untuk berkontribusi. Namun dengan perubahan orientasi perguruan tinggi untuk menelurkan tenaga yang siap bekerja, membuat perguruan tinggi memerlukan akses untuk melatih sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat praktik keberlanjutan ini. Beberapa mekanisme magang dan kompetisi merupakan salah satu cara mempercepat



transfer keahlian tersebut. Dan dari segi kompetisi, sudah banyak universitas kelas dunia yang mengadakan kompetisi kewirausahaan sosial untuk memecahkan masalah dunia dengan memanfaatkan potensi mahasiswa.

Dan terakhir, peranan perguruan tinggi sebagai pusat penelitian dan pengembangan dapat menempatkan perguruan tinggi sebagai salah satu agent of change melalui pengkajian dan pengembangan teknologi baik teknis maupun sosial agar masalah keberlanjutan ini dapat mendapatkan penyelesaian dengan segera.

Ina A. Murwani yang merupakan Ketua Program Pasca Sarjana Jurusan Marketing di Sekolah Bisnis Binus Nusantara (Binus), Jakarta yang sekaligus kandidat doktor dengan fokus disertasi di bidang sustainability management, mengungkapkan bahwa Sustainability Management atau pengelolaan berkelanjutan sedang menjadi topik yang banyak dibicarakan di berbagai kalangan, baik pelaku usaha, peneliti, pemerintah, organisasi nirlaba, dan perguruan tinggi. Untuk industri

agro-food sendiri, masalah sustainability menjadi sangat kritis karena terputusnya rantai suplai bahan baku merupakan risiko terbesar bagi bisnis di sektor pertanian ini. Meningkatnya jumlah masyarakat menengah di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, Cina dan India berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan produk-produk sekunder yang sebelumnya tidak diperlukan. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan permintaan akan bahan baku beberapa komoditi perkebunan, dan salah satunya adalah biji kakao.

Peningkatan permintaan bahan baku tersebut seharusnya menjadi berita gembira bagi para pekebun kakao dan pelaku usaha di sektor industri pengolahan cokelat. Namun, dikarenakan sifat dari pertanian komoditi yang berbasiskan petani kecil (smallholder farming), pengelolaan suplai ini pun menjadi lebih kompleks. Selain faktor harga komoditi yang berfluktuasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari perubahan cuaca, hama dan penyakit, sampai spekulasi dan ketidakstabilan negara produsen, faktor kesejahteraan para pekebun komoditi yang bersangkutan juga mempengaruhi kelancaran suplai untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan.

Beberapa perusahaan lokal dan multinasional telah mengalokasikan biaya tanggung jawab sosial perusahaan mereka untuk mendukung program keberlanjutan yang terkait baik di tingkat regional maupun global. Di industri pengolahan cokelat, ada beberapa inisiatif yang dilakukan dengan beberapa nama yang semuanya mengarah pada penciptaan dan pencapaian program keberlanjutan seperti Cocoa Sustainable Initiative (Mars), Cocoa Life (Mondelez), Cocoa Sustainable Supply Chain (Cargill), Cocoa Horizons (Barry Callebaut), Cocoa Plan (Nestle), dan beberapa hal lainnya merupakan upaya yang ditempuh untuk meningkatkan produksi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas

di tingkat pekebun berskala kecil. Badan internasional seperti ICCO juga telah menggagas Cocoa Sustainable Economy (2007). Dari dunia non-profit, dibentuknya forum Cocoa Sustainable Partnership dan Program Sustainable Cocoa Production (SCPP) dari Swisscontact membuat pelaksanaan program pencapaian keberlanjutan menjadi lebih nyata.

Dari segi kerja sama industri kakao sudah memberikan semacam petunjuk untuk mencapai jalan ke arah sustainability dengan visi yang jelas, kemitraan yang efektif, pendanaan yang terus bertumbuh, pemantauan kemajuan untuk keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan¹. Di Indonesia sendiri, penerbitan *Road Map to Sustainable Indonesian Cocoa* oleh Cocoa Sustainability Partnership sudah merupakan sebuah langkah besar dalam menyuarakan visi peningkatan produktifitas kakao di Indonesia. Kemajuan dari kerjasama ini masih harus dibuktikan dengan tercapainya target peningkatan produksi dan produktivitas serta kualitas biji kakao di tahun 2020.

Program sustainability bukanlah program yang mudah mengelolanya. Ada beberapa faktor yang membuat program ini memiliki kesulitan yang tinggi dalam hal pengelolaan antara lain (1) Tiga pilar sustainability yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial membutuhkan pengetahuan multidisiplin yang spesifik. Bukan hanya yang terkait masalah teknik pertanian, namun juga pengetahuan mengenai permasalahan sosial, keuangan, dan faktor lingkungan lainnya; (2) Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil; (3) Jenis program keberlanjutan selalu melibatkan *multi stakeholder partnership* yang menyuarakan berbagai pihak dengan segala kepentingan dan keterbatasannya agar berada dalam satu tujuan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ditambah lagi

¹Long, J. 2008. From Cocoa to CSR: Finding Sustainability in a Cup of Hot Chocolate. Thunderbird International Business Review. Vol. 50, No. 5 September/October 2008

dengan kemungkinan timbulnya konflik selama perjalanan kerjasama menambah kompleksitas dari tata kelola program keberlanjutan; (4) *Cost effectiveness and efficiency*, jumlah investasi keuangan yang menjadi beban perusahaan dan badan donor belum pernah diuji efektifitasnya. Tingkat investasi yang sebesar apa yang masih dapat ditanggung oleh para pemilik modal; (5) *Scale-up formula* yang effektif dan faktor teknologi yang dapat mempercepat proses transisi perubahan belum terpetakan; dan (6) Keselarasan perubahan preferensi konsumen pembeli produk akhir dengan keberhasilan ketersediaan suplai yang memadai belum pernah dikaji. Konsumen merupakan sumber kehidupan bisnis coklat ini. Kekurangan atau ketiadaan suplai dapat membuat perusahaan kehilangan konsumen karena adanya perubahan preferensi selera dan kebutuhan. Seberapa cepatkah perubahan preferensi ini dibandingkan dengan peningkatan produksi belum pernah dikaji. Pengetahuan pergerakan pasar dan konsumen merupakan hal yang jarang diangkat dalam sustainability program.

SUSTAINABLE COCOA PRODUCTION PROGRAM (SCPP), UJUNG TOMBAK PENJANGKAUAN PEKEBUN KAKAO BERSKALA KECIL

Swisscontact melalui Sustainable Cocoa Production Program , disingkat SCPP, mulai diperkenalkan sekitar tahun 2012 yang bertujuan untuk peningkatan rantai nilai kakao Indonesia yang memiliki daya saing tinggi, dan merupakan sebuah proyek pengembangan kemitraan publik dan swasta. Program ini didukung dan didanai oleh Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Sustainable Trade Initiative (IDH), Embassy of the Kingdom of the Netherlands, International Fund for Agricultural Development (IFAD), Millennium Challenge Account for Indonesia (MCA-I), dan beberapa perusahaan dan industri swasta di sektor kakao dan pengolahan cokelat.

SCPP ini diimplementasikan untuk mencapai tujuan dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi 130.000 pekebun kakao berskala kecil di 50 kabupaten/kota terpilih di 12 provinsi sebagai sentra penghasil kakao. Program ini sendiri telah menyelesaikan dua dari empat fase yang diterapkan dalam kurun waktu 2010-2020.

Sebagai sebuah kemitraan publik-swasta yang besar besar, program ini dikerja samakan dengan berbagai mitra di sektor swasta, termasuk BT Cocoa, Barry Callebaut, Cargill, Ecom, JB Cocoa, Mars, Mondelēz International, dan Nestlé, untuk melakukan upaya dalam meningkatkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari rantai pasokan kakao berkelanjutan. Program ini juga adalah upaya untuk membangun dasar dalam meningkatkan transparansi dan keterlacakkan produk guna mendorong perubahan sektoral.

Secara keseluruhan, tujuan yang hendak diupayakan oleh SCPP adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga pekebun kakao sebesar 75%, dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kakao sebesar 30%. Secara umum bisa dikatakan bahwa program ini memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan khusus dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan di sektor kakao Indonesia. Program ini mengimplementasikan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang merupakan gabungan dari praktik pertanian yang baik (GAP), sistem transfer teknologi, pertanian iklim, integrasi gizi dan kepekaan jender, organisasi petani, akses pasar dan sertifikasi, fasilitas pembiayaan agribisnis terpadu, pemberdayaan masyarakat, tatakelola pemangku kepentingan, dan platform jejaring.

Dr. Rino A. Sa'danoer, selaku Head of Program Implementation di SCPP ini, menjelaskan bahwa kondisi sektor kakao di Indonesia saat kini mengalami kecenderungan penurunan produksi dan produktivitas. Dan untuk meningkatkan

produksi dan produktivitas tersebut, termasuk di dalamnya adalah upaya perbaikan mutu biji kakao, sangat tergantung dari insentif yang diciptakan oleh berbagai pihak yang berhubungan dengan sektor ini. Misalnya saja bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang memihak dan mendukung pengembangan di sektor kakao. Dan insentif lainnya adalah persoalan harga. Jika dibandingkan dengan komoditas alternatif lainnya, posisi harga untuk komoditas kakao masih jauh lebih baik. Jika semua insentif-insentif tersebut tadi tetap mendukung dan berpihak kepada pekebun kakao berskala kecil, maka tidak bisa dipungkiri bahwa mereka di kemudian hari akan tetap setia dan memelihara tanaman kakao mereka.

Hal yang harus diperhatikan sekarang adalah apakah ada upaya-upaya lain yang bisa membuat semua ini tetap berkelanjutan? Misalnya harga dan kualitas biji kakao. Peranan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya sangat penting dalam menjaga upaya-upaya tersebut sehingga peran-peran yang dilaksanakan akan memberikan nilai tambah kepada petani. Petani bukan hanya mengharapkan hasil penjualan dari biji kakao dengan kualitas terbaik mereka, namun mereka juga memperoleh pendapatan tambahan dari sektor kakao, selain harga tentu saja.

Oleh karenanya, pihak-pihak tersebut tadi harus bisa memikirkan dengan cermat bahwa apakah pekebun kakao bisa hidup dengan layak, sehat, dan berkehidupan jika hanya berharap dari harga penjualan biji kakao mereka, dan juga apakah mereka mampu menghidupi generasi berikutnya jika hanya berharap dari sektor kakao saja. Itu yang harus diperhatikan lebih lanjut.

Dalam persiapan menuju kakao berkelanjutan di Indonesia, Swisscontact melalui SCPP mengupayakan beberapa langkah dengan tiga aspek yang dikedepankan. Aspek pertama adalah ekonomi



petani, bagaimana produksi, produktivitas, kualitas biji kakao yang dihasilkan, dan organisasi petaninya. Aspek berikutnya adalah lingkungan dengan melihat bahwa apakah pertanian atau perkebunan kakao ini menunjang penghidupan para petani tapi tetap memelihara lingkungan yang ada, karena ini yang akan mempengaruhi unsur keberlanjutan. Dan aspek terakhir adalah sosial, yakni menitik beratkan pada aspek kesetaraan gender dan keterlibatan pemuda dalam sektor kakao.

Dalam pelaksanaan program tersebut, awareness dan frame platform yang penting dikembangkan agar di masa mendatang akan ada aspek kesetaraan gender dan keterlibatan pemuda di sektor kakao. Dan hal penting lainnya adalah bahwa pekebun kakao hidup di dalam lingkungan sosial mereka, oleh karenanya kemakmuran tidak hanya akan dinikmati oleh petani secara perseorangan. Akan tetapi bagaimana hal tersebut juga bisa dirasakan oleh lingkungan sosialnya masing-masing.

Untuk pelaksanaan SCPP untuk fase ke dua ini, sekitar 50 kabupaten/kota di Indonesia, akan ditargetkan sekitar 200.000 orang petani hingga 2020 dengan konsentrasi daerah pengembangan adalah di Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali,

NTB, dan NTT. Apa yang dilakukan SCPP dalam mencapai kakao berkelanjutan di Indonesia saat ini adalah sebagai upaya untuk menciptakan kendaraan yang akan mengantar kita semua ke gerbang kakao berkelanjutan itu tadi. Meskipun di awal-awal program, SCPP lebih berfokus pada hal bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas, kualitas biji kakao, dan pendapatan petani kakao.

Kendaraan yang dimaksud dalam uraian di atas adalah pengandaian posisi kita sekarang ini untuk mencapai isu kakao berkelanjutan di Indonesia. Dan saat ini kendaraan tersebut sedang diperlukan oleh SCPP bersama ratusan ribu petani yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Sehingga pada saat program ini sudah tidak dilaksanakan lagi, maka sudah akan ada kendaraan yang akan mengantarkan petani, dan kita semua tentu saja, ke kakao Indonesia yang berkelanjutan.

Hambatan yang paling dirasa dalam mencapai kakao Indonesia yang berkelanjutan adalah bagaimana mempersiapkan manusia agar memiliki profesionalisme di sektor kakao. Meskipun buah dari kerja keras selama ini sudah mulai Nampak. Misalnya saja peningkatan pendapatan keluarga petani kakao karena intervensi yang dilakukan secara konsisten dan

terarah selama ini, tapi tantangannya kemudian adalah bagaimana tetap mempertahankan hal tersebut, apalagi jika misalnya program intervensi ini nantinya selesai, apakah akan tetap meningkat pendapatan petani, atau malah menu-run.

Dukungan yang dipersiapkan dan diberikan oleh pemerintah selama ini biasanya adalah pembagian bibit gratis, dan pupuk kepada kelompok tani petani kakao di desa-desa. Dan ini bisa dikatakan belum strategis penjangkauannya, karena pemerintah hanya bereaksi terhadap persoalan yang ada sekarang ini. Seharusnya pemerintah lebih banyak mengembangkan strategi-strategi yang memiliki pengaruh dan manfaat jangka panjang. Misalnya saja bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia di sektor kakao, atau mempersiapkan regulasi-regulasi yang memang mendukung pengembangan sektor kakao di Indonesia. Hal lain yang bisa dilakukan adalah pemerintah mengembangkan program insentif kepada kelompok petani kakao sehingga banyak menarik minat pihak lainnya, di antaranya mungkin pengadaan infrastruktur yang lebih baik, dan upaya dalam menghasilkan petani professional.

Intinya adalah bagaimana memampukan para petani kakao ini tidak sekadar sebagai produsen biji kakao, tapi mereka juga berperan dalam rantai nilai kakao sebagai pemberi nilai tambah. Oleh karenanya, organisasi-organisasi yang mendukung hal tersebut harus diperkuat, sehingga para petani memiliki kemampuan lebih untuk memproduksi biji kakao untuk tingkatan yang lebih lanjut. ©



MEMASTIKAN KEBERLANJUTAN KAKAO DENGAN KEBUN PENYAMBUNGAN

Ribuan petani di Aceh Barat Daya dan sekitarnya sekarang bisa “hidup kembali”. Mereka bisa memotong pucuk bibit dan merehabilitasi tanaman kakao yang sudah berumur dengan tunas-tunas baru dari kebun bibit bersertifikasi yang dikelola Musliadi dan kelompok petani Mekar. Dari Juni hingga Desember 2014, kelompok itu bisa menjual 5.000 tunas bersertifikasi dengan keuntungan mencapai Rp 120 juta.

Di antara pohon kakao sehat dengan buah-buah merah, sesosok mungil namun terlihat kuat sedang sibuk memotong cabang kakao untuk diubah menjadi bibit. Namanya Musliadi, 30 tahun, petani kakao di Desa Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya, Nanggroe

Aceh Darussalam (NAD). Musliadi sudah bergabung dengan program Peningkatan Ekonomi Kakao Aceh (PEKA) Swisscontact sejak 2010.

Melalui program PEKA, Swisscontact memberikan pelatihan sekolah lapang untuk petani hingga Maret 2012. Dengan

dukungan pendanaan dari pemerintah Swiss, Swisscontact melanjutkan dukungan terhadap rumah tangga petani kakao di lima kabupaten termasuk Aceh Barat Daya. Dukungan ini dilaksanakan melalui program Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) yang berlangsung dari Januari 2012 hingga Desember 2015.

Kembali pada 2010, Musliadi mengikuti 16 hari pelatihan intensif dan menghadiri beberapa modul, termasuk praktik pertanian yang baik, pengelolaan pasca-panen, dan rehabilitasi kebun. Hasilnya, dia pun menjadi petani terlatih dan kembali termotivasi untuk mengurus kebun kakaonya lagi. “Dengan pengetahuan

yang saya peroleh dari sekolah lapang, saya percaya diri untuk mengembalikan produksi setengah hektar lahan saya. Setelah menerapkan semua teknik yang direkomendasikan pada pohon kakao saya, perubahan pun terlihat. Contohnya daun-daun yang lebih sehat dan bunga kakao lebih mekar, pada tanaman yang kami budidayakan," kata Musliadi.

Dia bahkan kemudian dipilih menjadi Ketua Kelompok Tani Mekar, sebagai bukti bahwa dia juga menjadi panutan bagi anggota kelompoknya.

Kesuksesan Musliadi didengar pamanya, Akmansyah yang bekerja sebagai staf Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan salah satu pemandu utama Swisscontact di Aceh Barat Daya. Saat itu, Akmansyah juga sadar pentingnya membuat kebun bibit sebagai sumber bibit untuk mengembalikan produksi kakao lokal. Akmansyah secara sukarela mengizinkan dua hektar lahannya untuk ditanami 1.800 bibit kakao unggul. Dia meminta Musliadi untuk mencoba kemampuan untuk mengelola lahan.

Akhirnya, pada 2011, bibit klon unggul S1, S2, TSH858 dan 45 pun ditanam sebagaimana rekomendasi dari sekolah lapang. Biaya pembibitan tersebut dari Swisscontact dan Disbun setempat. Dengan bantuan Akmansyah dan tujuh anggota kelompok, Musliadi mengelola dua hektar lahan secara tepat. Setelah 1,5 tahun, beberapa pohon mulai berbuah. Hal yang mengejutkan, buahnya sangat banyak dan sehat tanpa penyakit maupun hama. Permintaan terhadap bibit juga banyak.

"Jujur saja, ide awal hanya untuk membuat kebun klon. Namun, hasil hingga Desember 2014, enam ton biji kakao sudah kami produksi tiap tahun dengan harga sekitar Rp 120 juta. Dan dari penjualan 5.000 cabang bibit, kami mendapatkan untung Rp 20 juta," katanya dengan bangga.

Menyaksikan itu semua, Musliadi dan Akmansyah, dengan dukungan dari Disbun, berencana meminta sertifikasi

kebun klon dengan melibatkan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) sebagai badan sertifikasi nasional. Selama evaluasi, fasilitator dari SCPP Swisscontact tetap memonitoring perkembangan kebin dan menyediakan masukan-masukan berharga. Setelah satu tahun proses, akhirnya kebun klon tersebut mendapat sertifikat dari Puslitkoka pada Juni 2014.

Saat ini, petani di Aceh Barat Daya dan sekitarnya tak perlu khawatir lagi untuk mendapatkan batang bibit yang bisa diandalkan. Kebun klon yang sudah bersertifikasi sudah siap memenuhi kebutuhan ribuan petani, termasuk penerima manfaat SCPP dari kabupaten-kabupaten lain di Aceh. Selain itu, kebun ini juga bisa digunakan sebagai lokasi bagi petani yang ingin melakukan uji coba untuk

mendapatkan produksi kakao yang lebih baik.

Musliadi berharap semoga keberhasilannya membuat kebun bibit dan tunas kakao bisa menginspirasi petani-petani lain di Aceh. Sebab sudah terbukti mereka juga bisa mendapatkan keuntungan berlipat tidak hanya untuk pemilik dan pengelola lahan tapi juga untuk petani-petani lain.

"Saya ingin berterima kasih kepada Swisscontact untuk pelatihan berharga dan pengawasan terus menerus yang membawa saya lebih dekat untuk mewujudkan mimpi memiliki keluarga sejahtera sebagai hasil dari usaha kakao," ujarnya. [SwissContact] ☺



SATELIT BRI PERLUAS LAYANAN BAGI UMKM DAN KUR



SEBAGAI upaya untuk memoles kinerja perbankan yang kian positif dari tahun ke tahun, mulai Juni 2016 ini, satelit PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang diberi nama BRIsat tersebut akan mengorbit di angkasa dengan jangkauan wilayah cukup luas. Direktur Utama BRI, Asmawi Syam mengungkapkan, dalam rangka program financial inclusion serta mempersiapkan infrastruktur menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BRIsat tersebut adalah bentuk inisiatif pengembangan teknologi satelit agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk nasabah. Sejalan dengan hal tersebut, BRI juga bakal menambah jaringan kantor di seluruh pelosok Indonesia, seperti pedalaman Papua, Kalimantan serta mengembangkan electronic banking.

Perbankan pelat merah ini menggandeng perusahaan manufaktur satelit dari AS Space System/Loral dan perusahaan peluncur satelit Arianespace dari Perancis. Satelit ini sendiri mulai digagas sekitar awal tahun 2014 dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pengelolahan slot orbit dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menjadi penyelenggara khusus, dan kemudian diberikan slot orbit 150,5 derajat bujur timur mulai 1 September 2015. BRIsat ini sendiri mempunyai berat sekitar 3.500 kg dengan jumlah transponder 45 buah dan menjangkau wilayah Indonesia, ASEAN, Asia Timur Laut serta sebagian Pasifik dan Australia Barat.

Direktur Utama BRI, Asmawi Syam, lebih lanjut menjelaskan bahwa alasan

pembangunan satelit jaringan komunikasi sendiri tersebut adalah karena pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan selama satu dasawarsa ini baik dari sisi aset, kredit, dana pihak ke tiga serta laba yang bersinar di atas industri perbankan nasional. Asmawi menyebut, pertumbuhan aset sejak 2003 sampai akhir 2013 tumbuh enam kali lipat dari Rp 95 triliun menjadi Rp 606 triliun. Sehingga pangsa pasar meningkat dari 7,8% menjadi 12,24%. Dan di sektor perkreditan sendiri, tumbuh 10 kali lipat menjadi Rp 431 triliun dari sebelumnya di 2003 sebesar Rp 47 triliun. Hal ini membuat BRI menjadi penyalur kredit terbesar secara nasional dengan pangsa pasar 13,08% di akhir tahun 2013. Dan di tahun yang sama, total penghimpunan dana di akhir 2013

bertumbuh tujuh kali lipat menjadi lebih dari Rp 486 triliun dari Rp 76 triliun di 2003, sehingga pangsa pasar dari 8,59% menjadi 13,27%. "Dari sisi laba, pencapaian meningkat dari Rp 2,58 triliun menjadi Rp 21,16 triliun atau tumbuh delapan kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Dan ini merupakan laba tertinggi dari perbankan nasional sejak 2005," lanjutnya.

Sementara raihan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama 2007-2013 mencapai Rp 87 triliun dengan basis debitur Rp 9,3 juta orang. Sampai akhir Desember 2014, BRI telah memiliki lebih dari 9.800 jaringan kerja kantor dan 104 ribu e-channel. Ditambahkan lagi bahwa sejak lima tahun terakhir, pertumbuhan yang signifikan membutuhkan peningkatan jaringan komunikasi satelit karena beda dengan Tiongkok dan India yang punya jaringan kantor yang lebih mudah dijangkau. Sebelumnya, BRI sudah menyewa jaringan komunikasi yang menggunakan 23 transponder dari 9 operator berbasis satelit dan terestrial.

ALASAN BRI MELUNCURKAN BRISAT

Seperti yang telah diketahui, selain Telkom, perbankan juga menggunakan jasa satelit untuk transfer informasi dan data. Selain itu, transaksi yang dilakukan melalui ATM, kartu kredit dan debit juga menggunakan jasa satelit.

1. Bank Pertama di Dunia dengan Satelit Sendiri

Pada saat penanda tanganan kerjasama antara BRI dengan Space Systems/Loral Amerika Serikat dan Arianespace Perancis di tahun 2014 silam, pemerintah saat itu mengapresiasi langkah bisnis yang dilakukan perusahaan BUMN, dan memuji Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B BRI) sebagai bank pertama di dunia yang punya satelit sendiri. Aksi korporasi BRI ini bakal mencuri perhatian dunia dan akan menjadi tonggak sejarah, BRI jadi bank pertama di dunia yang memiliki satelit sendiri yang sangat berguna untuk mengembangkan bis-

nisnya.

Harapannya adalah bahwa BRI harus menjadi bank yang paling depan untuk mewujudkan menyalurkan kredit mikro dan usaha rakyat agar usaha terus menengah, menjangkau kalangan masyarakat di pelosok tanah air. Pelayanan masyarakat bisa diperluas, terutama financial inclusion bisa diwujudkan.

2. Pemotongan Biaya Operasional

Pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B BRI) memperkirakan kepemilikan satelit komunikasi sendiri menghemat biaya operasional mencapai Rp. 600 miliar per tahun. Selain efisiensi bisnis, kepemilikan satelit ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Dengan memiliki satelit yang mendukung komunikasi sendiri, maka dapat menekan biaya operasional untuk komunikasi. Dan pada saat pengoperasionalnya pada tahun pertama bisa memangkas biaya sekitar Rp. 500 miliar hingga Rp. 600 miliar, dan daya pakai satelit tersebut nantinya adalah sekitar 15 tahun, dan bisa diperkirakan kemudian berapa total penghematan yang bisa diraih.

3. Tidak Ada Lagi ATM dan Kantor Cabang Offline

Diakui bahwa selama ini pihak perbankan sering mendapat keluhan nasabah terkait pelayanan berbasis teknologi informasi. Pada umumnya, keluhan tersebut berkisar pada persoalan sistem yang sering sekali mati, atau offline, dan lebih banyak waktu yang digunakan oleh pelanggan di kasir untuk menunggu selesainya sebuah transaksi. Itu bukan masalah teknologi BRI, tapi komunikasinya yang kapasitasnya rendah atau diturunkan. Dengan pengoperasian BRIsat ini nantinya, maka 19.000 ATM dan 9.800 kantor cabang milik BRI tidak akan mengalami gangguan lagi.

4. Terdepan Wujudkan Inklusi Keuangan

Dengan satelit yang akan diluncurkan di Arianespace Perancis itu direncanakan pada tanggal 17 Juni 2016 waktu Kourou, Guyana, atau 18 Juni 2016 waktu Indonesia, maka akan menjadikan bank pelat merah itu sebagai bank yang terdepan dalam perluasan akses layanan keuangan masyarakat di seluruh Indonesia. BRI harus jadi bank paling depan untuk wujudkan financial inclusion dan benar-benar menyalurkan kredit mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar usaha mikro kecil menengah terus berkembang dan terjangkau oleh masyarakat sampai ke pelosok tanah air.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Bank BRI) merupakan perbankan yang fokus menggarap segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bank BRI meyakini kehadiran satelit komunikasi, BRIsat akan memberikan benefit dan akses yang lebih luas bagi UMKM dalam layanan perbankan.

"Tidak sekadar memberikan benefit, BRIsat yang diluncurkan dan mengorbit di slot 150,5 derajat Bujur Timur, 36.000 km di atas Papua adalah untuk UMKM Indonesia," ujar Direktur Utama Bank BRI, Asmawi Syam.

Dia menuturkan, kehadiran satelit BRI menjadi kabar baik bagi UMKM karena akses terhadap perbankan meningkat dan akses pilihan layanan semakin banyak. Sehingga, mereka dapat menikmati layanan perbankan dengan maksimal.

"Sektor UMKM merupakan motor penggerak dan pilar perekonomian. Di mana lebih dari 99% entitas usaha di Indonesia adalah UMKM dengan kontribusi terhadap pembentuk GDP (gross domestic product) lebih dari 57%," terangnya.

Jika daya saing UMKM meningkat, lanjut Asmawi, efeknya sangat besar terhadap perekonomian nasional. "Dari berbagai aspek yang perlu disempurnakan untuk peningkatan daya saing UMKM, adalah peningkatan akses permodalan dari perbankan," tandas Asmawi. ©

BAHAN TANAM

TEKNOLOGI TANAMAN KAKAO

PRINSIP UTAMA:

- Persyaratan mengenai pertumbuhan pohon dan pembuahan:
- Potensi produksi minimal 2 kilogram/pohon/tahun.
- Berat biji minimal 1 gram, tahan terhadap hama dan penyakit (keseragaman).
- Jangan menanam satu jenis klon saja, minimal 3 jenis klon (keserasian klon) dalam satu lahan. Ditanam berselang-seling 3 - 4 pohon setiap satu klon.
- Gunakan varietas klon yang telah disertifikasi/ direkomendasi oleh pemerintah, dapat beradaptasi pada area yang berbeda lingkungan misalnya daerah basah atau kering dan toleran terhadap hama dan penyakit (beradaptasi/ perbandingan dengan lokal klon). Jika sumber dari luar, pastikan klon sudah disertifikasi. Sumber entres bisa diperoleh dari kebun produksi, asal klon jelas (dimurnikan).

ISU:

- Kurangnya ketersediaan klon dan kebun entris yang memenuhi standar/sertifikasi.
- Akses petani untuk mendapatkan klon yang bersertifikat yang masih sulit.
- Pengetahuan petani tentang klon masih terbatas.
- Peran pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dari ketersediaan klon bersertifikat.

REKOMENDASI:

Melakukan pembibitan sendiri secara berkelompok dan lokasi di tingkat kelompok tani.





PENANAMAN KAKAO EVALUASI KESESUAIAN LAHAN

PRINSIP UTAMA:

- pH tanah lokasi 6.0-7.0, di bawah atau di atas pH tersebut tidak direkomendasikan untuk penanaman kakao.
- Kemiringan lahan < 150. Topografi dengan kemiringan diatas 150 memerlukan terasering. Tidak direkomendasikan menanam kakao diatas kemiringan 450
- Tanah kelas S4 tidak sesuai untuk menanam kakao. Tanah kelas S4 adalah tanah curam dengan terjadinya erosi, tanah kering dan berpasir, tanah dengan pH sekitar 4.0, tanah dengan batu-batuhan yang menghambat, tanah dengan kurang adanya bahan organik.
- Lokasi harus mempertimbangkan ketersediaan air.

ISU:

Petani sulit membuat terasering dan banyak daerah topografi miring yang masih ditanami kakao tanpa pengelolaan lahan.

PEMBUKAAN LAHAN BARU

PRINSIP UTAMA:

Lahan untuk tanam kakao berada di luar area hutan lindung dan hutan konservasi atau status lahan jelas (jelas kepemilikan berdasarkan hukum).

ISU:

Batas formal antara hutan lindung, konservasi dan produksi yang belum diketahui petani.

PEMBERSIHAN LAHAN (PENANAMAN BARU DAN PENANA- MAN ULANG)

PRINSIP UTAMA:

- Dilarang melakukan pembakaran dan penggunaan bahan aktif herbisida yang dilarang lembaga yang berwenang.
- Tidak menggunakan alat berat yang akan merusak permukaan tanah.
- Membuka lahan secara manual adalah digalakkan.
- Cabang-cabang kecil / daun / ranting dibiarakan dikebun untuk menjaga kesuburan tanah.

ISU:

Efisiensi versus kelestarian lingkungan

CATATAN:

Ketika membuka lahan tidak menebang habis, menyisakan beberapa pohon penaung dengan catatan bukan inang hama penyakit kakao dan kanopi masih meneruskan cahaya.

Lokakarya Perencanaan Forum Kakao Daerah

Bogor, 28-29 Januari 2016. Berdasar hasil lokakarya terbatas tanggal 26 Oktober 2015 yang membahas tentang Forum Kakao Daerah, diperoleh kesepahaman sementara mengenai makna forum. Makna ini menjadi penting untuk digunakan sebagai dasar untuk membangun kesepahaman bersama dengan Forum Kakao Daerah sebagai dasar dalam menerjemahkannya dalam rencana aksi mereka khususnya dapat dijabarkan dalam rencana kerja forum tahun 2016.

Pencapaian yang diperoleh dari lokakarya tersebut adalah sebagai berikut:

- Berbagi pembelajaran tentang cara kerja sebuah forum dari Forum Pengembangan Ekonomi Sumber Daya (FPESD) Jawa Tengah, menjadi wacana untuk memperkaya pemahaman tentang peran dan fungsi forum.
- Ada gambaran perkembangan masing-masing forum dalam satu tahun terakhir berdasarkan kegiatan yang dipaparkan oleh masing-masing forum.
- Ada kesepahaman dan kesepakatan bersama mengenai fungsi forum yaitu “sebagai wadah komunikasi, koordinasi, mediasi, advokasi, dan berbagi sumberdaya antar seluruh pemangku kepentingan yang tepat sasaran, untuk kepentingan dan kesejahteraan petani serta pemangku kepentingan lainnya secara berkeadilan dalam rangka pengembangan kakao berkelanjutan”.
- Beberapa pointer mengenai harapan Forum terhadap CSP di antaranya adalah sebagai berikut:
 - Pelibatan forum terhadap kegiatan-kegiatan CSP harus lebih dioptimalkan.
 - Ada ruang publikasi bagi forum kakao dalam setiap pertemuan nasional.
 - Mendukung pengaturan mekanisme dan regulasi organisasi sehingga menjadi lebih baik.



- MoU antara CSP dan program kerja dibuat dalam jangka menengah atau panjang (2-3 tahun).
- CSP dapat mendorong pihak-pihak terkait agar menjadi mitra strategisnya.
- Ada isu bersama yang dibangun untuk melihat isu-isu tertentu dalam perkakaoan dan dipublikasikan secara nasional.
- CSP dapat membantu forum untuk lebih aktif mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- CSP diharapkan dapat membantu forum agar semua pemangku kepentingan sepakat untuk bergabung dalam forum, meskipun dengan memiliki latar belakang yang berbeda, namun dapat bekerja sama.
- CSP dapat membantu forum untuk mengakomodasi kepentingan yang berbeda dari masing-masing pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk dalam rangka memperkuat peran dan fungsi forum, yakni mengoordinasikan dan memfasilitasi kepentingan pemangku kepentingan dan memastikan semua anggota mendapat manfaat.
- CSP dapat mendukung forum sehingga dapat berperan untuk mengawal semua bantuan pemerintah yang ditujukan kepada petani, tepat sasaran sesuai dengan peran dan fungsinya.
- Ada rencana kerja masing-masing forum dengan beberapa masukan umum di samping masukan khusus per rencana kerja forum. Adapun masukan umum tersebut adalah sebagai berikut:
 - Untuk menyiasati adanya keterbatasan, dalam perencanaan perlu memikirkan rencana-rencana yang secara efektif dapat dilakukan oleh Forum yang tidak memerlukan biaya besar tetapi berdampak strategis (luas).
 - Kebutuhan petani adalah input, tahu bagaimana, dan pasar. Bagaimana hal ini dapat diperankan oleh forum untuk memastikan petani memperoleh manfaat.
 - Perlu memikirkan strategi diseminasi informasi yang didapat dari hasil diskusi dan sebagainya sehingga dapat membantu penyebaran informasi yang lebih luas. Disarankan forum bisa masuk dalam skema Musrenbang Kabupaten agar isu-isu strategis tentang kakao yang dikumpulkan oleh forum masih dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Untuk tingkat provinsi, forum bisa hadir/terlibat dalam konsultasi RAPBD Provinsi.
 - Cara kerja tim di forum perlu dirancang sehingga peran masing-masing anggota dapat membawa visi dan misi forum masuk ke semua pemangku kepentingan.
 - Forum diharapkan mulai memikirkan untuk dapat

- melihat dampak yaitu peningkatan produksi di tingkat petani.
- Dalam alokasi anggaran perencanaan, perlu dimasukan pihak-pihak yang memungkinkan dapat berkontribusi. Bisa jadi hal ini dapat dijadikan salah satu ukuran keberhasilan forum.
 - Forum bisa berfungsi sebagai mediator antar pelaksana program dan regulator (bisa diperjelas dalam perencanaan).
 - Forum dapat melibatkan DPRD.
 - Forum dapat berfungsi menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan semua pihak.

Sebagai tindak lanjut dari lokakarya tersebut, rekomendasinya adalah sebagai berikut:

- Sebisa mungkin setiap undangan kegiatan yang dikirimkan

oleh CSP kepada forum ditembuskan ke Pemda (usulan dari Fomakara).

- Untuk staf pemda yang diikutkan dalam kegiatan CSP, tidak perlu diberikan perdiem, karena sudah memperoleh perjalanan dinas dari SKPD-nya
- Forum menyempurnakan rencana kerjanya berdasarkan masukan-masukan yang diberikan sebagaimana diuraikan diatas sebagai lampiran MoU.
- CSP mengirimkan draft MoU kepada forum paling lambat 01 Februari 2016.
- Masing-masing forum memberikan masukan paling lambat 05 Februari 2016.
- Perwakilan dari forum mengirimkan kerangka kriteria untuk kegiatan yang dapat didukung CSP paling lambat 05 Februari 2016, dan dimulai per 01 Maret 2016. ☺

Audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan Forum Petani Kakao Kabupaten Majene

Majene, 23 Februari 2016. Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Kantor Eksekutif Cocoa Sustainability Partnership oleh Supervisory Board bahwa untuk tahun 2016 ini, CSP haruslah meletakkan fokus dan perhatian di tingkat lapangan guna mengerahkan segala sumber daya dan kemampuan yang ada untuk memfasilitasi petani/pekebun kakao dalam mencapai perubahan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kakao mereka.

Acara yang dilangsungkan di Aula Bupati Kabupaten Majene, Sulawesi Barat ini dihadiri oleh jajaran SKPD Kabupaten Majene di antaranya Bappeda, Asisten III, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Badan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta organisasi anggota CSP yakni Bridgewater dan SCPP-Swisscontact, dan Forum Petani Kakao Kabupaten Majene. Dari hasil pertemuan tersebut, diperoleh gambaran tentang luasan dan potensi sektor kakao salah satu kabupaten penghasil kakao di Sulawesi Barat ini, dan bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan intervensi untuk peningkatan produksi dan produktivitas kakao.

Acara yang difasilitasi oleh CSP ini juga dijadikan sebagai ruang dialog antara pemerintah daerah dan SKPD terkait dengan para organisasi-organisasi pelaksana kegiatan, dan para petani tentu saja sehingga bisa diperoleh gambaran tentang isu-isu signifikan program pengembangan kakao di Kabupaten Majene serta penggalangan ide kolaborasi antar lini para pemangku kepentingan untuk menangani beberapa persoalan mendesak yang dihadapi oleh petani kakao di daerah. Acara ini pula digagas sebagai upaya untuk memperoleh gambaran umum tentang pe-



laksanaan Program Pengembangan Kakao Berkelanjutan, serta persiapan program kolaborasi yang akan dibangun oleh CSP dan Kementerian Pertanian dalam hal pengembangan klaster perekonomian kakao di beberapa wilayah kabupaten di Indonesia.

Selain itu pula, kunjungan dan audiensi dengan Bupati Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dan Forum Petani Kakao Kabupaten Majene adalah untuk mengetahui kondisi forum-forum kakao daerah yang ada di wilayah kabupaten/kota untuk kemudian ditinjau ulang posisinya dan kemungkinan untuk dilakukan pengembangan kapasitas agar bisa berperan sebagai sebuah organisasi atau wadah lalu lintas data dan informasi, dan menjadi lokomotif penggerak upaya peningkatan produksi dan produktivitas kakao di masa mendatang. ☺

Kunjungan ke Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Sahabat Cipta

Nagekeo, 16 Februari 2016. Yayasan Sahabat Cipta (YSC) yang merupakan organisasi anggota Cocoa Sustainability Partnership yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur. Untuk perluasan wilayah dampak program intervensi yang dilakukan, baru-baru ini YSC melakukan pendekatan pembinaan kepada kelompok petani kakao di Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam kunjungan ke kelompok petani kakao tersebut, pihak pemerintah desa juga ikut hadir untuk memberikan gambaran tentang luasan, prospek, dan persoalan yang dihadapi oleh petani di lapangan. Masyarakat di Desa Wolokisa ini sudah terbiasa dengan tanaman kakao, dan menjadi sentra produksi untuk wilayah Kabupaten Nagekeo. Namun kondisi tanaman yang semakin menurun produktivitasnya harus segera memperoleh perhatian khusus. Uniknya lagi, desa ini belum pernah ada sebelumnya program intervensi yang dilakukan oleh pihak manapun untuk sektor tanaman kakao. Alasan-alasan tersebut kemudian menjadi pertimbangan bagi Yayasan Sahabat Cipta untuk memulai inisiatif pendampingan bagi petani kakao di wilayah



tersebut.

Hal menarik lainnya adalah dukungan dari pihak pemerintah desa. Untuk tahun ini, melalui musrenbang kabupaten anggaran untuk program kakao disiapkan sekitar 50 juta rupiah yang akan digunakan oleh petani kakao dalam mengakses bahan tanam yang berkualitas. Sebelum itu, beberapa orang petani dari Desa Wolokisa telah dilatih melalui Sekolah Lapang yang difasilitasi oleh CLC Yayasan Sahabat Cipta di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dan kini, mereka kembali ke desa mereka untuk menyebarkan pengetahuan teknis perawatan tanaman kakao, khususnya bagaimana melakukan pembibitan untuk menyediakan bahan tanam dan kebun entris. ☺

Peningkatan Kapasitas Pelaporan di Forum Kakao Sumatera Barat



Padang, 17 Maret 2016. Sebagai tindak lanjut dari hasil Lokakarya Perencanaan Forum Kakao Daerah tanggal 28-29 Januari 2016 silam, maka CSP akan menyediakan dukungan kepada Forum Kakao Daerah (FKD) guna meningkatkan sinergi dan menindak-

lanjuti kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di sektor kakao dan implementasinya di tingkat regional. Kebutuhan lainnya yang dirasa penting adalah peningkatan kapasitas forum.

Dengan dasar pemikiran untuk mempermudah jalannya operasional dari Nota Kesepahaman yang akan ditandatangani, dan bagi perlengkapan administrasi Forum Kakao Daerah, maka beberapa format administrasi harus dipersiapkan sebagai dokumentasi pelaporan. Format-format administrasi tersebut adalah Rencana Kerja, Rancangan Anggaran Biaya, Administrasi Pengelolaan Keuangan, dan Laporan Narasi Kegiatan. Oleh karenanya, guna memastikan bahwa format administrasi tersebut sesuai dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing Forum Kakao Daerah, maka kunjungan CSP ke Forum Kakao Daerah Sumatera Barat di Padang, adalah untuk melakukan konsultasi dan uji coba beberapa format administrasi dan pelaporan berkala tersebut.

Dari hasil konsultasi dan uji coba ini, akan disempurnakan kemudian dan dijadikan satu pokok bahasan tersendiri dalam pertemuan Forum Kakao Daerah sehari sebelum pelaksanaan Pertemuan Pemangku Kepentingan (General Assembly Meeting) April. Beberapa rekomendasi muncul dari pertemuan ini, antara lain bahwa format administrasi pelaporan kegiatan dan keuangan dibahas dan dipraktekkan oleh tim sekretariat Forum Kakao Sumatera Barat, dan hasilnya tidak ada kendala berarti. Untuk format pelaporan narasi, diperlukan penyederhanaan format dengan tanpa mengurangi makna informasi yang penting untuk dilaporkan. Sedangkan untuk agenda kegiatan pertemuan FKD sehari sebelum GA Meeting April, diperlukan untuk membahas strategi bagaimana FKD bisa terlibat dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di CSP guna mengawasi tindakan aksi di lapangan yang hasilnya menjadi bahan presentasi di GA Meeting guna memperoleh persetujuan. Untuk media dan kepentingan publikasi tentang Forum Kakao Daerah, CSP perlu membuat sebuah dokumen buku kecil yang memberikan informasi dan penjelasan umum tentang Forum Kakao Daerah dan

dibagikan kepada semua anggota CSP dan simpatisan dalam pelaksanaan General Assembly Meeting.

Pak Ishak Manti, selaku ketua forum, akan membantu menyederhanakan format laporan narasi dalam bentuk tabel untuk memudahkan pengisinya. Dalam pertemuan berbagi pembelajaran, diusulkan membahas tindak lanjut dari pertemuan Bogor di antaranya menyempurnakan rencana kerja forum tahun 2016 sebagai bahan lampiran untuk MoU, kesesuaian RAB, dan format-format lampiran yang diperlukan dalam MoU; menyepakati dan merancang bahan presentasi dan diskusi dalam GA meeting yang berkaitan dengan keberadaan FKD dan hal-hal penting apa yang perlu diambil atau diputuskan dalam GA berkenaan dengan keberadaan forum untuk mendukung terjadinya sinergi program di tingkat lapangan. Bahan-bahan hasil pertemuan dengan CSP dengan Kementerian dalam program sinergi perlu disosialisasikan ke forum dan menjadi salah satu dasar forum menyempurnakan rencana kerjanya. ☈

Berbagi Pembelajaran: Kegiatan dan Agenda Forum Kakao Daerah

Makassar, 04 April 2016. Seperti biasanya, sehari sebelum pelaksanaan GA Meeting, maka Kantor Eksekutif CSP akan mempertemukan semua Forum Kakao Daerah untuk melakukan pertemuan berbagi pengalaman. Acara ini tujuannya adalah untuk melihat kegiatan-kegiatan penting yang telah dilaksanakan oleh masing-masing FKD dan agenda rencana kegiatan selanjutnya untuk tahun 2016 yang berjalan.

Pada pertemuan satu hari tersebut, para perwakilan Forum Kakao Daerah dari setiap daerah membicarakan tindak lanjut dari Lokakarya Perencanaan Forum Kakao Daerah di Bogor silam, pembahasan konsep dan fungsi forum, penyusunan rencana aksi berdasarkan fungsi, dan pembicaraan lebih lanjut tentang Nota Kesepahaman Bersama dan dokumen-dokumen pelengkapnya. Selain itu, pertemuan ini juga untuk menentukan dan menyusun bahan-bahan presentasi Forum Kakao Daerah yang akan disampaikan di GA Meeting besok harinya.

Dari diskusi yang terbangun, ada beberapa hal penting yang berhasil dicapai, misalnya bahwa kegiatan yang direncanakan dan dilakukan oleh FKD tidak boleh keluar atau menyimpang dari Statuta CSP; FKD hanyalah merupakan corong dari CSP untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi dan mediasi



aspirasi petani ke GA Meeting; FKD bukan merupakan pelaksana proyekttetapi hanya berfungsi untuk mengorganisir, menyinergikan, mengumpulkan pembelajaran di lapangan; dan lain sebagainya.

Inti dari upaya yang selama ini dilakukan oleh CSP bersama organisasi anggotanya adalah bagaimana memberdayakan Forum Kakao Daerah sehingga bisa berfungsi untuk dapat menggerakkan sektor di lapangan dengan membangun kolaborasi dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor publik dan swasta. Hal lain yang ditekankan bahwa dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kakao Daerah, tidaklah seharusnya bersinggungan atau bermuatan aspek politik praktis yang bisa membuat posisi FKD menjadi tidak netral bagi para pemangku kepentingan pada umumnya, dan anggota-anggota CSP lainnya secara khusus. ☈

World Cocoa Foundation: KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT PEKEBUN KAKAO

WORLD COCOA FOUNDATION (WCF) adalah sebuah organisasi keanggotaan internasional yang mempromosikan keberlanjutan di sektor kakao. WCF memberi dukungan yang dibutuhkan oleh pekebun kakao dalam mengembangkan kakao yang lebih berkualitas dan memperkuat masyarakat mereka secara sosial dan ekonomis. Para anggota dan mitra WCF sebagian besar terdiri dari perusahaan kakao dan cokelat, pengolahan, perusahaan perdagangan kakao, dan perusahaan lainnya yang sifatnya multinasional, yang merupakan perwakilan dari porsi terbesar dalam pasar kakao secara global. Program-program WCF memberikan manfaat

kepada pekebun kakao dan masyarakatnya di kawasan produsen utama kakao di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika.

WCF sendiri didirikan pada tahun 2000 oleh sekelompok perusahaan cokelat yang melihat pentingnya untuk memberikan dukungan kepada pekebun kakao dalam hal menjaga hasil kebun mereka dan tanamannya, termasuk pengetahuan teknis dalam mengendalikan penyakit dan hama yang menyerang tanaman kakao.

Dewasa ini WCF mengimplementasikan, mengelola, dan berpartisipasi dalam program-program di tingkatan masyarakat untuk membantu keluarga pekebun kakao mandiri di 15 negara penghasil

kakao di seluruh dunia. Program-program WCF tersebut memberikan pelatihan kepada pekebun kakao tentang bagaimana mengembangkan kakao yang lebih produktif agar bisa memperoleh keuntungan yang lebih baik, membantu mereka membangun koperasi dan kelompok yang efektif untuk tujuan pemasaran yang lebih kuat, menyediakan hasil-hasil penelitian yang merupakan solusi untuk mengurangi kerugian di tanaman mereka dan untuk melawan penyakit tanaman, mempromosikan inklusi tanaman lainnya di atas lahan kakao sebagai sumber pendapatan alternatif dan sebagai bahan pangan, dan memperluas akses pendidikan bagi gene-



rasi muda di masyarakat produsen kakao.

WCF memainkan peranan yang penting dalam membangun komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dan memfasilitasi kemitraan publik-swasta untuk kakao berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, WCF bekerja-sama dan membangun kemitraan dengan perusahaan, pemerintah, yayasan swasta, institusi internasional, organisasi kemasarakatan (LSM), akademisi, dan institusi penelitian di seluruh dunia. Dengan cara membangun kemitraan dan kerjasama seperti ini, membantu WCF dalam mengoptimalkan pengetahuan dan komitmen dari mitra-mitranya dan memaksimalkan keuntungan yang bisa dirasakan langsung oleh pekebun kakao beserta keluarganya.

Penelitian merupakan sebuah bagian penting dalam tugas dan fungsi WCF sebagai penyokong utama dalam mewujudkan kakao berkelanjutan. WCF menghimpun para peneliti agar secara bersama-sama meletakkan focus pada isu-isu kritis, menjaga varietas-varietas kakao yang khas, dan mendukung kesempatan penelitian dan pertukaran pengetahuan di sektor penelitian kakao. Salah satu contohnya adalah Cocoa Borlaug Fellowship. Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Fellowship Program/Global Cocoa Initiative mendukung pertukaran para ahli kakao dari Amerika, Asia Tenggara, dan Afrika. Program tersebut memberikan dukungan dalam bentuk sponsor kepada para ahli untuk menyelesaikan penelitian selama dua hingga tiga bulan di Amerika Serikat sehingga bisa membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang bisa digunakan dan dibagi dengan mitra kerja mereka nantinya. Program ini didukung oleh WCF dan Departemen Pertanian Amerika Serikat/ Foreign Agriculture Service.

Pada akhir tahun 2015, WCF secara resmi membuka kantor kecil di Makassar yang menandai langkah awal dalam menyebar luaskan eksistensi WCF di kawasan Asia Tenggara.



SEKILAS TENTANG PENELITIAN TERAPAN KAKAO INDONESIA DAN PROGRAM DUKUNGAN PENYULUHAN

Penelitian Terapan Kakao Indonesia dan Program Dukungan Penyuluhan dilaksanakan guna membangun kapasitas institusi lokal untuk menjawab tiga tantangan yang dihadapi produksi kakao Indonesia: pengendalian hama dan penyakit, tanaman kakao yang tua, dan kualitas produksi. Proyek ini memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian dan alih teknologi guna memberikan solusi terhadap tantang tersebut sehingga bisa meningkatkan kualitas penghidupan keluarga pekebun kakao, dan kualitas produksi kakao mereka.

Dengan dukungan dari Ford Foundation, WCF memberikan bantuan pendanaan kepada tiga institusi untuk melaksanakan empat proyek penelitian: dua proyek pe-

nelitian dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakaolndonesia, satu dengan Universitas Hasanuddin, dan satu proyek lagi dikembangkan oleh Universitas Mataram.

Berkat dukungan dari Ford Foundation dan WCF tersebut, ketiga institusi penelitian di Indonesia ini akan memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan keilmuan dan teknologi dalam perkebunan kakao dan memberikan pengaruh luas ke masyarakat di mana mereka bekerja. Saat ini, WCF sedang mencari peluang untuk mengembangkan kerja-kerja kolaborasi di masa mendatang yang tidak hanya di Indonesia, namun juga di wilayah Asia Tenggara. ☈



Lokakarya Konsolidasi Gugus Tugas

Guna mengkaji ulang dan menyesuaikan peta jalan gugus tugas, maka lokakarya konsolidasi untuk gugus tugas ini dilaksanakan pada awal Februari 2016.

Hasil yang ingin dicapai adalah roadmap gugus tugas tersebut haruslah disesuaikan dan dipastikan untuk bisa memenuhi tujuan peta jalan CSP tahun 2020.

Makassar, 03 Februari 2016. Dalam Lokakarya Konsolidasi Gugus Tugas ini, Dr. Ir. Imam Suharto, M.Sc. selaku Supervisory Board Chairman kembali menegaskan bahwa fungsi dan kedudukan gugus tugas ini dalam struktur Cocoa Sustainability Partnership adalah sebagai "motor penggerak" dari apa yang dicita-citakan semua pelaku dan pemangku kepentingan di sektor pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia. Gugus tugas, atau dikenal sebagai Task Force, ini juga

adalah bukan sebagai *project/program implementor* melainkan sebagai *think tank* yang harus memikirkan bagaimana memberikan pemecahan atas persoalan-persoalan yang dihadapi di sektor kakao.

Selama satu hari penuh, para anggota CSP yang sudah memastikan diri untuk bergabung dalam gugus tugas tertentu bertemu dan berdiskusi untuk menentukan peta jalan gugus tugas selama periode 2016. Dari paparan masing-masing gugus tugas, ditemukan bahwa ada beberapa

rapa persoalan penting yang harus segera dicarikan pemecahannya. Misalnya urusan akses petani, atau pekebun, terhadap permodalan, akses terhadap bahan tanam dan pupuk, dan tingkat adopsi penerapan GAP yang masih rendah di tingkat petani/pekebun kakao. Oleh karenanya, dalam periode tahun 2016 ini, setiap task force akan berupaya melahirkan rekomendasi atau prinsip-prinsip umum sebagai referensi tandingan bagi para pekebun kakao di daerah sebagai upaya handal untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kakao, serta tetap menjaga kualitas biji kakao.

Hasil akhir dari lokakarya ini adalah masing-masing gugus tugas telah memiliki peta jalan untuk tahun 2016 beserta dengan keluaran yang nantinya akan berfungsi sebagai bahan rekomendasi dan referensi dalam pengelolaan tanaman kakao bagi para pemangku kepentingan. ©

Pertemuan Koordinasi Pemetaan Klon Kakao

Jember, 18 Maret 2016. Salah satu hal yang merupakan kebutuhan prioritas dalam mempromosikan sektor kakao yang berkelanjutan di Indonesia adalah akses yang lebih baik bagi petani terhadap bahan tanam yang telah dikembangkan, khususnya akses terhadap klon kakao.

Mengingat hal tersebut di atas, maka Gugus Tugas Agro Input dan Planting Material melaksanakan pertemuan koordinasi antara anggota CSP dan beberapa pemangku kepentingan terkait lainnya untuk melengkapi dan menyempurnakan pemetaan klon kakao yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bertempat di Puslitkoka (ICCRI) Jember, pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret

2016 dan dihadiri oleh 25 peserta yang merupakan perwakilan dari 8 institusi berbeda.

Dalam pertemuan yang dimaksud, disepakati bahwa survei yang akan dilakukan untuk melengkapi pemetaan klon kakao tersebut tidak hanya untuk memetakan persebaran klon kakao secara nasional, tetapi juga untuk bahan tanam (hibrid). Dan untuk membuat sebuah pemetaan klon kakao dan bahan tanam yang terintegrasi secara nasional, maka CSP, dalam hal ini Gugus Tugas Agro Input dan Planting Material, akan menghubungi PTPN II, PTPN IV, PTPN VII, dan beberapa perusahaan perkebunan lainnya dengan alasan bahwa mereka memiliki sejarah

dan semenjak lama telah bersentuhan langsung dengan klon kakao di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka Gugus Tugas Agro Input dan Planting Material akan mengumpulkan data dari PT. Inangsari (Sumatera Barat) dan perusahaan perkebunan lainnya di Pulau Seram, Maluku, Papua, dan Kalimantan Timur, ataukah meminta data dari pemerintah setempat; melakukan kolaborasi dengan Puslitkoka untuk proses pengumpulan data di Papua; dan hasil pemetaan klon kakao ini akan didistribusikan ke anggota Gugus Tugas Agro Input dan Planting Material dan anggota CSP lainnya untuk memperoleh masukan penyempurnaan.©



GA Meeting: Kolaborasi Publik-Swasta untuk Kakao Berkelanjutan Indonesia

Makassar, 05 April 2016. Sebagai Pertemuan Pemangku Kepentingan yang pertama untuk tahun 2016 ini, GA Meeting yang diselenggarakan di Makassar ini, menjadi sedikit berbeda atmosfirnya. Tahun ini, CSP bersama organisasi anggotanya yang terdiri dari kolaborasi publik dan swasta membangun kerjasama penting dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Repub-

lik Indonesia. Dan di GA Meeting inilah kemudian, sebagai wadah pengambil keputusan tertinggi di CSP, Program Kolaborasi tersebut dibicarakan dan meminta persetujuan dari anggota yang hadir.

Program Kolaborasi yang diberi nama CEPAT (Cocoa Economic Cluster Partnership) ini telah digagas tahun sebelumnya, dan mulai tahun ini komunikasi antara CSP dan Direktorat Jenderal Perkebunan,

dalam hal ini Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, terbangun melalui rangkaian rapat koordinasi. Dalam pelaksanaan GA Meeting juga kali ini rancangan kerangka program kolaborasi ini juga ditanad tangani di hadapan para perwakilan anggota yang sempat hadir.

Dalam forum yang sama, pihak Kantor Eksekutif akan membuat perencanaan kuarter ke dua yang disesuaikan dengan apa yang telah disumbangsihkan oleh Supervisory Board melalui saran dan masukan yang sifatnya membangun. Sedangkan untuk pengembangan Forum Kakao Daerah, telah disepakati bersama bahwa forum yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia ini akan memiliki program rencana aksi selama tahun 2016. Dengan persyaratan bahwa setiap kegiatan forum tersebut nantinya, harus melibatkan lebih banyak lagi pelaku dan pemangku kepentingan di sektor kakao.

Untuk pelaksanaan GA Meeting selanjutnya, rencananya diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2016, dengan agenda utama yang tidak banyak berubah dengan GA Meeting sebelumnya.©



Nota Kesepahaman Bersama Program Kolaborasi Cocoa Economic Cluster Partnership – CEPAT

Sebagai tindak lanjut dari penanda tanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan DEKAINDO, ICCRI/PUSLITKOKA, ASKINDO, AIKI, APIKCI, dan CSP pada tanggal 17 September 2015 silam di Yogyakarta, maka untuk tujuan koordinasi, dukungan, dan upaya untuk pencapaian target pengembangan kakao berkelanjutan Indonesia, Program Kolaborasi ini pun tercipta.

Makassar, 04 April 2016. Menurut permaparan dari Bapak Dr. Ir. Dwi Praptomo, M.Sc., Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, bahwa program pengembangan kakao di Indonesia untuk tahun 2016 tersebar di 22 provinsi dan 76 kabupaten/kota dengan total luas wilayah sebesar 82.470 hektar di mana di antara lokasi pelaksanaan tersebut, terdapat sekitar 10 lokasi yang juga merupakan lokasi program organisasi anggota CSP. Oleh karenanya, program kolaborasi yang diberi nama CEPAT (Cocoa Economic Cluster Partnership) ini sangat membutuhkan partisipasi dan dukungan aktif dari pemerintah, pihak swasta, dan petani itu sendiri yang harus kemudian disinergikan sehingga dapat mempercepat pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas kakao Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Cocoa Sustainability Partnership, Rini Indrayanti, menjelaskan bahwa semenjak tahun 2015 CSP telah menyokong kinerja pemerintah melalui Nota Kesepahaman Bersama untuk membangun dan mendukung program pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia. Oleh karenanya, program kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat usaha peningkatan produksi dan produktivitas di sektor kakao. Hasil yang diharapkan dari CEPAT ini adalah adanya model kolaborasi antar pemangku kepentingan yang bisa direplikasi di wilayah lain di Indonesia, khususnya untuk model mekanisme penyediaan dan distribusi pupuk dan bahan tanam, dan dokumentasi bahan-bahan pelajaran dan praktik cerdas untuk pengembangan program berikutnya di masa mendatang.

Wilayah fokus untuk CEPAT ini akan diselaraskan dengan fokus CSP di tahun 2016 khususnya untuk bidang pupuk dan kesehatan tanah, akses ke bahan tanam, dan pemberdayaan tenaga penyuluh dan petani. Sedangkan wilayah target dari program kolaborasi ini ditentukan sesuai dengan tiga kriteria khusus, yakni

wilayah-wilayah yang telah ditentukan dalam Permenan No. 46 tentang pengembangan wilayah, lokasinya adalah wilayah intervensi program-program yang diterapkan oleh organisasi anggota, dan kabupaten/kota yang telah dikategorikan sebagai wilayah mandiri yang mengelola sendiri DIPA mereka. Dari keseluruhan wilayah tersebut, akan ada 12 kabupaten yang akan menjadi wilayah target dari program kolaborasi Cocoa Economic Cluster Partnership (CEPAT) ini yang tersebar dari Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur.

Sebelum penanda tanganan secara simbolis Nota Kesepahaman Bersama Program Kolaborasi Cocoa Economic Cluster Partnership (CEPAT) tersebut, ada beberapa masukan dari anggota CSP menyangkut rancangan rencana kerjasama tersebut. Masukan atau saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerangka Acuan program kolaborasi ini harus direvisi secara lebih detail untuk menghindari persepsi yang keliru dan memberikan kejelasan bagi anggota CSP itu sendiri beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Terlebih khusus lagi menyangkut capaian atau keluaran yang diharapkan dari kolaborasi CSP dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini, dan harus dibangun atas kesepakatan bersama.
2. Penyusunan program kolaborasi ini harus lebih bersifat pragmatis dan memiliki visi target jangka panjang yang harus dicapai.
3. Pihak lain yang harus dilibatkan dan dibangun komunikasi untuk kerjasama adalah pihak perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia.
4. Pada taraf pelaksanaan program kolaborasi ini nantinya, kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai bagian awal adalah pengembangan koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah daerah, khususnya penjabaran tentang tugas dan kewajiban yang diemban dalam program CEPAT sehingga implementasi
- program akan berjalan lebih efektif dan tidak akan memunculkan sikap penolakan dari pemerintah daerah itu sendiri.
5. Peranan Forum Kakao Daerah dalam program CEPAT ini adalah diharapkan untuk memberikan dukungan dalam hal koordinasi dan monitoring evaluasi di tingkat lapangan.
6. Program CEPAT ini juga bisa digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas kakao dan sebisa mungkin dijadikan referensi dalam mengembangkan rancangan program dan anggaran untuk memastikan keberlangsungan dukungan yang diberikan kepada petani.
7. Pihak Kantor Eksekutif Cocoa Sustainability Partnership akan membentuk sebuah tim kecil yang bisa saja diberi nama Gugus Tugas CEPAT yang anggotanya terdiri dari perwakilan setiap gugus tugas yang ada sekarang, anggota dewan pengawas, organisasi anggota CSP sebagai mitra pelaksana, dan institusi yang dianggap penting peranannya, misalnya saja Puslitkoka.
8. Gugus Tugas CEPAT ini akan bekerja-sama dengan pihak pemangku kepentingan lainnya, termasuk Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan institusi teknis di tataran lokal untuk memformulasikan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan dalam penerapan dan pelaksanaan Program Kolaborasi Cocoa Economic Cluster Partnership.
9. Kantor Eksekutif Cocoa Sustainability Partnership juga akan berfungsi untuk membangun koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan dan Gugus Tugas, atau Tim Kecil CEPAT. ©



ENGLISH SECTION

40

Creating Cocoa
Sustainability in
Indonesia

44

Developing Sustainable
Cocoa

48

Synergy and
Partnership towards
Sustainable
Indonesian Cocoa

56

Ensuring Cocoa
Sustainability with
Grafting Nursery

58

BRI Satelite Expands
Services for UMKM
and KUR



60

World Cocoa
Foundation

62

Cocoa Forum
Update



CREATING COCOA SUSTAINABILITY IN INDONESIA

SUSTAINABLE AGRICULTURE AT GLANCE

THE AGRICULTURE, or state crop, sector has changed significantly and dramatically since the end of World War II. This can be seen that food and fiber production due to use of new technologies, mechanization, increased on chemical use, specialization and government policies are very much towards the maximization of production. These changes has caused reduce in number of farmers and labors, with demand of producing foods and fiber to fulfill consumption demand in the some parts of the world.

Alhtough these changes have brought benefits and positive impacts for farmers by reducing the risks faced by them, there are negative impacts remain. The negative side of the acceleration of the agricultural sector, for example is the problems faced due to the depletion of topsoil, ground water pollution, decreasing number of family's farm, disregarding of the living and working condition of agricultural labors, increasing production cost and the disintergration of the aconomic and social conditions in rural communities.

A growing movement has emerged during the past two decades to question the role and efforts of agricultural sector in

promoting practices that contribute to those social problems. Since 1994, the first edition of Special Reference Brief compiled and published by the National Agricultural Library, the Department of Agriculture (USDA), the word of "sustainability" became a familiar term in the ears. The goals to create a more sustainable planet, which accommodates the fundamental needs of population in the present while keeping the existing resources in order to allow the future generations to have the opportunity to utilize all of the resource, began to gain acceptance in the wider community. Since then sustainable agriculture, and/or sustainable production, significantly began to be directed by agricultural societies.

The term of "sustainable agriculture" certainly reaps some rebuttal. For example, the fact that in this current world that is expanding rapidly and changing drastically, is there anything that can be said to be sustainable? Along with others various contradictions. With this debate, we should have a look for a moment the condition of the food production system that we have today, and then evaluate it for a description of the condition of the food in the future.

The word of "sustainable" is derived and abstracted from the Greek, "sustinerre" (sus-, from below, and -tenere, hold or retain), so, "sustainability" could be interpreted as supporting efforts to stay afloat and continue to exist for the long term. If it is associated with agriculture, hence the term of "sustainable" describes farming systems that are able to maintain its productivity, and of course have a side benefit to the surrounding community. The agricultural system must have the factors and elements that support the conservation of natural resources, social, commercial, competitive and environmentally friendly.

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE AGRICULTURE

Sustainable agriculture integrates three main objectives, namely environmental health, economic profitability, and social and economic justice. Various philosophies, policies, and practices have a significant contribution to this purpose, and people from different capacities, ranging from farmers to consumers, has been agreed and shared this vision and also contributed respectively.

Sustainability in principle means that we must meet the needs of the present without compromising the interests of future generations to meet their own needs later. Based on this, we come at a major conclusion that in "sustainability", protection and accountability for natural and human resources is paramount. Management of human resources that covers consideration of social responsibilities such as working and living conditions of workers, the needs of rural communities, and the health and safety of consumers, both in the present and in the future. While the responsibility for land and natural resources as an attempt to maintain or increase the resource of long term base vital.

Making the transition to sustainable agriculture is a process. But for farmers, the transition seems to require a series of

concrete realistic steps. The economic condition of the family and personal goals will affect how fast or how far the process of change will be. One thing to remember is that every small decision can make a difference and contribute to further speed up the whole system in a "sustainable agriculture." Another thing to consider in achieving the goal of sustainable agriculture is the responsibility of everyone in the system in place, including farmers, workers, policy makers, researchers, buyers, and consumers. Every society has its own part to play and contribute to each other in strengthening the sustainable agriculture community.

To clarify the focus towards the achievement of these targets, there are some specific strategies that have been grouped into three different areas but actually it is a bond that cannot be scattered. The group of specific strategies are as follows: (1). Agriculture and Natural Resources; (2). Crop and Livestock Production Practices; and (3). Economic, Social, Political Contexts.

BENEFITS OF SUSTAINABLE AGRICULTURE

Sustainable agriculture is an effort in the production of food, fiber, or plant or animal products that are using farming techniques that protect the environment, public health, community, and environmental sustainability. This form of agriculture allows us to produce healthy food without sacrificing safety and the interests of future generations as they would do the same.

The main benefits of sustainable agriculture are:

1. Environmental Preservation

In the manufacturing of plant and animal products, sustainable agricultural systems will make efforts without relying on chemical pesticides, synthetic fertil-



izers, genetically modified seeds, or practice that degrades the soil, water, or other natural resources. The concept of this farm prefers on planting various types of plants and uses a variety of techniques such as crop rotation, soil conservation, and pasture-based livestock husbandry. Sustainable agricultural protects biodiversity and encourage the development and maintenance of healthy ecosystems.

2. Protection to Public Health

Food production should never have an impact on human. Since sustainable crop farms avoid hazardous pesticides, they're able to grow fruits and vegetables that are safer for consumers, workers, and the surrounding community. Likewise, farmers will implement sustainable farms that raise animals without harmful practices, such as the use of non - therapists' antibiotics, or growth stimulants that contains arsenic. Governance through careful and responsible for animal waste, sustainable farmers also protects people from exposure to pathogens, toxins, and other harmful pollutants.

3. Sustaining Vibrant Communities

An important component of sustainable agriculture is its ability to remain economically viable, and on the other hand still provide a decent wage to the working conditions of fair, prosperous and safe for farmers and ranchers, farm-workers, food processors, and others employed in the food system. Sustainable agricultural systems also raised the local and regional economies, creating good jobs, and build a strong community.

4. Upholding Animal Welfare

Sustainable farmers or ranchers treat animals with care and respect, implementing livestock husbandry practices that protect animals' health and well-being. By raising livestock in pastures, they enable their animals to move freely, engage in their instinctive behavior, consume natural diet, and avoid the stress and illness associated with confinement.

SUSTAINABLE INDONESIAN COCOA

Sustainable cocoa production has significantly given so much effect to the people who live in developing countries, and the sector is roughly supports the livelihoods of around 40 to 50 million of farmers globally. Unlike other agribusiness sectors that have experienced massive mechanization and industrialization, in general, the cocoa sector was born from a narrow agricultural lands managed by communities of small-scale farmers with limited access to resources by extend to the market.

Given this reality, especially the problems and challenges faced by cocoa production globally, actors from the public and private sectors united and established coordination in the form of a partnership to take the support and expertise they have to improve and develop cacao plantations to be more sustainable based on the conditions of trade in each cocoa producer. For example, support the World Cocoa Foundation (WCF), that realizes these efforts in order to create a better livelihood at the level of smallholdings, increased of resources and investment at the central level, and the environment that is more secure and convenient for the small scale growers play a great role in providing for the supply of cocoa processing industry in order to meet the needs of consumers around the world.

By looking at the amount of small scale cocoa farmers in developing countries, with a rough calculation, there are approximately 5 million households that

manage cacao farm as their main source of income, and mostly inhabit tropical regions in West Africa, Asia East, and Latin America. For example, in Africa, about 70% of cacao produced from small-scale cacao farmers, and as a contributor to about 60% to 90% of their household income sources.

The challenges faced by the implementation of sustainable cocoa production, or agriculture, was not small and lightweight. Small-scale farmers have limited access to the resources needed and the organized market is also a challenge with a variety of problems. For example, a decrease in the production of cacao beans caused by pests and diseases, the age of the tree is increasingly aging and unproductive, and pests and diseases that attack plants. Another thing that is a major issue for small-scale cacao farmers that are difficulties in accessing agricultural supplies, and they are not fully familiar with the modern estates techniques. Another important thing is that they are difficult to obtain credit and insurance assistance for the management of their farms. Besides that, in most rural areas, particularly in the area of Saharan Desert in Africa, the dominant society is the cacao farmers who face a variety of social problems, such as low levels of literacy for adults, health risks, and lack of access for their children to attend proper education. Therefore, these factors mean that the actual production capability of the cacao sector in the long term is become a concern.

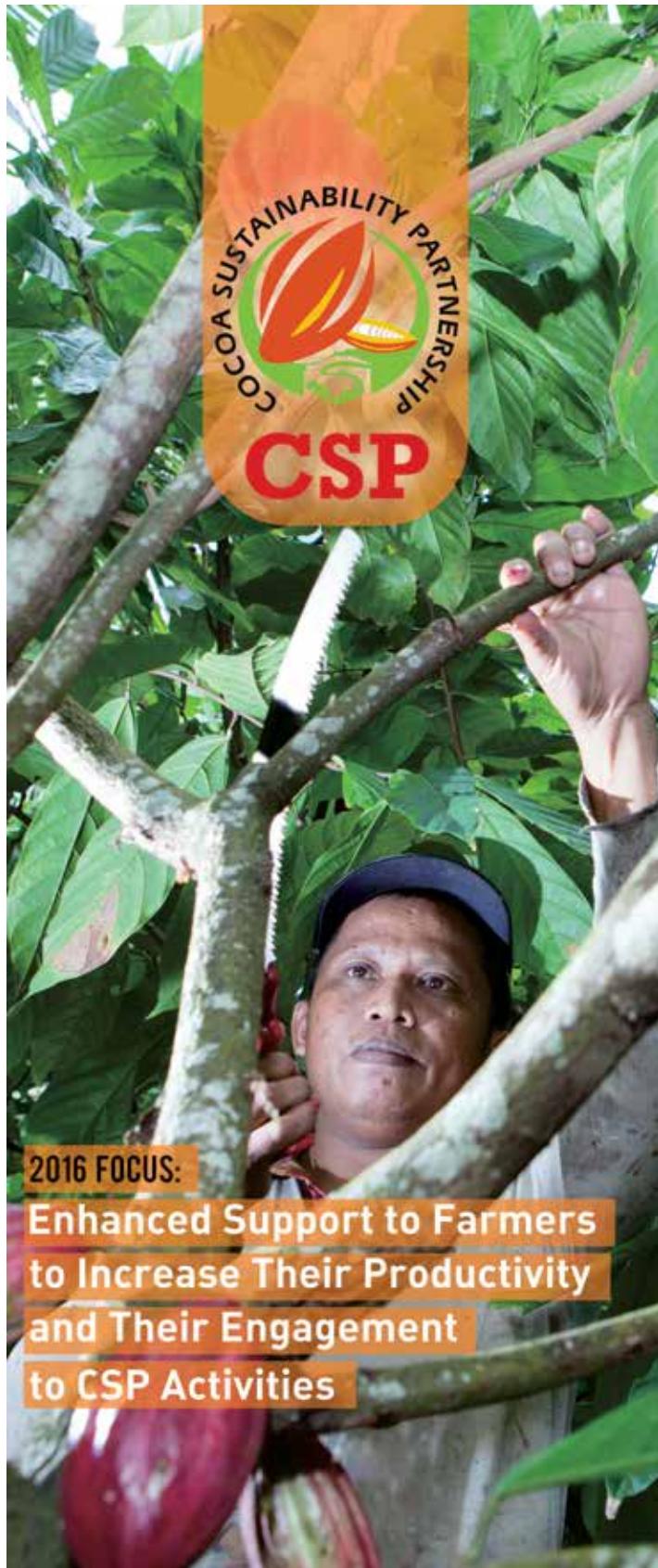
In response, the complex problems in the cocoa sector is very diverse, scattered, and too big to be solved by one party alone. But when stakeholders get together and build partnerships, knowledge and commitment of each party can be maximized and will provide benefits for the cacao farmers and their families. The option of joining industries and companies of upstream and downstream in the cocoa sector in partnership is certainly based on careful consideration. The

private sectors see the importance to be united and organized in order to invest in finding a way out of the challenges facing by them. For example, some of the chocolate companies collectively has made social investments in a regional partnerships programs built through the Cocoa Sustainability Partnership (CSP) in order to make a real contribution in increasing production and productivity of cacao farms in each region

The mechanism of public and private partnerships is one answer to all the problems encountered in the cacao sector, especially for small-scale farmers and their families. With the support of its members, the partnership serves to ensure the double of production and productivity of cacao farms owned by small-scale farmers. Such efforts pursued by improving market efficiency, increasing the productivity on land that is being managed, and income diversification. The results gained was that the farmers have been gradually increasing their production and productivity of their cacao, and have been managing their farm as a business. On the other side, the cacao farmers and their organizations have been able to engage actively, directly, and professionally with the buyers in strengthening their trade relations.

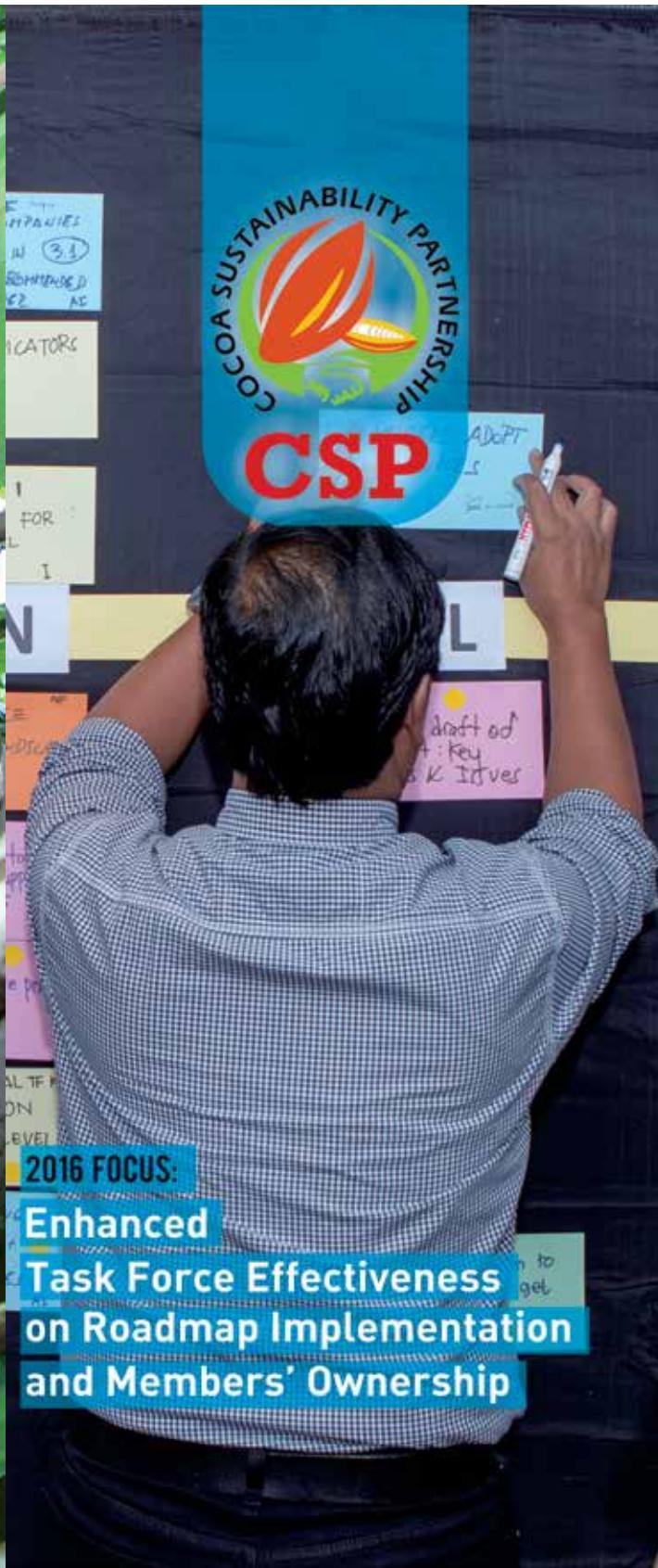
In addition to the support of the industries and the chocolate companies in the program generally, some of these private sectors and their value chain partners have joined forces to work directly with cacao farmers groups. Their commitment is by investing in materials, time, and knowledge to improve the quality of cacao beans produced in a more professional relationship with farmers.

Of course, there are several initiatives that are temporarily held by the partnerships that was built by the company, or private sectors, with public parties in order to achieve cocoa sustainability sector in Indonesia. Find out more how on the several articles presented along in this issue. ©



2016 FOCUS:

**Enhanced Support to Farmers
to Increase Their Productivity
and Their Engagement
to CSP Activities**



2016 FOCUS:

**Enhanced
Task Force Effectiveness
on Roadmap Implementation
and Members' Ownership**



DEVELOPING SUSTAINABLE COCOA

Fitrian Ardiansyah, Indonesia Country Director of IDH-Sustainable Trade Initiative

IN recent years, the cocoa sector in the world and also in Indonesia, has been working to be transformed into a more sustainable, environmental, and socially friendly while continuing to improve productivity. The biggest challenge in building a more sustainable cocoa sector is developing business models at the farmer level, which does not only focus on improving productivity, but also encourage an entrepreneurial farmer and cooperative management as well include elements of environmental protection.

With cocoa production level at more less 350,000 tons per year (2014/2015), Indonesia currently ranks third in the world. Cocoa is one of the most important export commodity for Indo-

nesia. Commodities are also important to the rural communities because the majority of the production of cocoa is produced by small-scale farmers. Currently, Indonesia has at least 1.5 million hectares of cocoa plantation, especially in Sulawesi, North Sumatra, West Java, Papua, and East Kalimantan. With so many cocoa production produced by small-scale farmers, cocoa sustainability aspect can not be achieved without the involvement of them.

In order to ensure success in establishing a sustainable cocoa sector, there should be additional efforts to encourage the option in developing sustainable livelihood for the communities where the cocoa farmers live, and to help farmers in increas-

ing entrepreneurial capacity. Without the innovations that help the capacity of farmers (especially in the context of increased productivity, better land management, and funding for farmers organizations or cooperatives) it will be difficult to ensure the sustainability of the cocoa sector.

In addition, due to the situation of export markets today which has been increasingly asking for a commodity to be produced with more attention to environmental and social protection, the development of sustainable cocoa in Indonesia should include aspects of local community development, women empowerment, poverty and malnutrition alleviation, and land management that does not cause fires, environmental degradation, and deforestation. In the realization of a sustainable cocoa sector, the development of a model or proof-of-concepts initiated jointly by industries, nonprofit organizations, farmers, and government institutions becomes important. Due to the model is expected to be replicated or developed on a broader scale to ensure coverage for the cocoa sector sustainable concept adopted by many parties.

INNOVATIONS IN THE LAND PRODUCTIVITY IMPROVEMENT AND FARMERS FINANCING

Compared to other commodities, one of the challenges to achieve sustainable cocoa sector is low productivity of the cocoa crops, particularly production of farmers with unit of per hectare. Due to this, a large number of cocoa farmers trapped in a cycle of poverty that causes them to be significantly indebted continuous and heavily. Low input which then produces a low output (quantity and quality), chronically detain the growth of cocoa commodity. The scheme to help farmers in the provision of better inputs, still do not have the same standards.

Meanwhile, funding for the farmers in managing land better is often not avail-



able on the grounds because the bank institutions are still assuming that it is a high risk to assist farmers in managing their cocoa farming, so farmers still depend on informal donors with only provide limited funds and in a short time, and of course, with high interest rates. This condition is exacerbated later by the aging plants, and unclear form of funding scheme for rejuvenation and rehabilitation.

Even so, there are actually several initiatives that have been developed in several places to overcome the cycle of low input-low output. For example, the support of a company that acts as a partner for farmers who could then guarantee a low price in the purchase of fertilizers that help farmers to ensure the availability input of fertilization. The development of certification and traceability (tracking in the supply chain) also helps to strengthen the relationship between companies/buyers and farmers, and it can help in identifying the components at the farm level that needs

to be strengthened, including in terms of agricultural input. Funding schemes and risk sharing in the provision of fertilizers and truck rental, can also be supported as an innovation that will help input certainty. In addition, the electronic banking systems (mobile banking) also continues to conceive as an innovation that will put farmers as actors who can be trusted to get help in the supply of inputs.

In reaching a broader scale of the innovations that have been made, the cooperation between the various stakeholders (local authorities, local banks, and international parties) becomes important. This cooperation is required mainly to generate various funding schemes with medium or long term that encourage the availability of funding support in the provision of inputs to farmers, land ownership or land rental, and financing of other operations. In succeeding this approach, the formation and the effective organization of farmers and cooperatives is crucial. In the absence of effective former organizations or co-

operatives, it will be difficult for banks to approve funding due to a risk to the financing scheme is higher if distributed to individual farmers.

In order to help farmers and their organizations, or cooperatives, to be more bankable, mentoring and empowerment as well as efforts to increase their capacity are necessity. Farmers and their organizations are expected to be introduced with the modules that will help them to manage their finances more efficient and reliably. Obviously, this can only be achieved if there are advocacy organizations at the local level, in cooperation with local banks or financial institutions, which is experienced in financial management in the region or village. Such cooperation can foster trust between the institutions and farmers can ask for facilitation and improve themselves and the institution. In turn, when farmers and their organizations can better manage their finances, farmers' bargaining position with the banks become bigger and stronger.

INNOVATIONS IN THE PROTECTION AND FULFILLMENT OF SOCIAL RIGHTS

One aspect that is important in the development of sustainable cocoa sector is social protection or the fulfillment of the rights of society. For Indonesia, the components that need to be considered among them is the empowerment of women, improved nutrition, and public access to activities in the supply chain that have been done mostly by the industries. The context of women empowerment is strategic because cocoa farming is perceived as a sector dominated by men. This has hampered women's access to land and resource use associated with the cultivation of land, and of course funding. Therefore, various innovations needed to provide an opportunity for women to be involved. For example, in the training provided, the portion of women's involvement will be increased, or the percentage of agricultural credit

for women farmers. Or other things that can be tried to increase the capacity of women is to engage them in entrepreneurial endeavors in cocoa sector, to become a leader in the farmers organization and cooperatives.

In the context of malnutrition, there are some breakthroughs that need to be done. Cases of child malnutrition, physical growth interferences, and poor sanitation can be overcome by combining the productivity of farmers' program with an increased intake of nutrition for families and children. One model that could be applied is to introduce the cultivation of plants that are useful for the improvement of nutrition, nutrition education, and changes in dietary components for farmers, and better family financial. Better family financial management certainly will help farmers to set aside some funds to meet nutrient intake for the family.

INNOVATIONS IN BETTER LAND MANAGEMENT AND PREVENTION OF DEFORESTATION

Although it is not like any other commodity that is more expansive, preventive aspects of environmental degradation, including the prevention of deforestation in the cocoa sector has become an integral part of market request. Prevention of environmental degradation and deforestation involving various parties and interests, especially in the management of space and land, which is quite complex. Most of the challenge is also associated with good or poor governance where the cocoa is developed.

In other place, cocoa could also be considered as a buffer, which in turn can protect the forest for looted or converted into other commodities. However, the development of cocoa in the buffer zone should be productive and add value to cocoa farmers to keep them from extending coverage into forest or replace cocoa plants into other plants that are more expansive.

Development of a model that bal-

ances between increase productivity while protecting the forest (production-protection) is relevant to the condition of Indonesia that still have beautiful natural forest. Productive cocoa farmers who care to environment, in turn, can be a very effective forest guards. If the model production-protection developed with other concepts, a kind of agroforestry, it could be interesting for non-conventional investors. Such investors can provide funding for their carbon uptake or protection of biodiversity, or value-added. It could be categorized as an additional income for farmers.

This kind of model can be effectively developed when planned at a landscape scale, which would require the involvement of local governments. The involvement of stakeholders from other commodities also become important for better objectives of landscape management should be supported by all business actors, farmers, and governments. The landscape approach can also provide economic stability to the region because it does not only depend on a single commodity, as well multi-commodity development synergies can be achieved.

BALANCE IN SUSTAINABILITY

In the development of sustainable cocoa sector, it is clear that the aspect of increasing productivity along with social and environmental protection should be encouraged in a balanced manner. The involvement of relevant stakeholders is also important because it can help ensure the realization of a sustainable cocoa in the field. Partnership in developing the model needs to be improved further in a higher or larger scale, such as at the landscape level. Indonesia, as the third largest cocoa producer country in the world, has the opportunity to transform the cocoa sector, which of course can only be done if the innovations and models mentioned above can be developed and implemented in the most important centers of cocoa across the country. ©





SYNERGY AND PARTNERSHIP TOWARDS SUSTAINABLE INDONESIAN COCOA

As described previously, the process towards a sustainable cocoa sector in Indonesia is not as easy as falling off a log. There are many regulations that must be prepared in order to bring Indonesia cocoa to become sustainable commodity sector. The sustainable concept is based on the unrest by stakeholders considering the current condition of our cocoa sector. Not only that the cocoa farmers are expected to double their production and productivity but also to improve the quality of the cocoa beans, and start thinking about how cocoa is treated wholeheartedly and can be enjoyed by future generations.

The problem faced by cocoa farmers in Indonesia is not simple and cannot be solved in a short time manner. The degradation of soil quality and fertility, that leads to a low production and productivity of cocoa, lack of access to finance, affordable fertilizer, and quality planting materials have become a scourge for farmers in their effort to increase production and productivity, and improving the quality of cocoa beans. Sustainable cocoa road map has been updated and its implementation improved for all stakeholders in the cocoa sector. The stakeholders agreed that in 2020 the target and the ambition to make



Indonesia as the largest cocoa producer country in the world, which has recently ranked on the third position, beating the Ivory Coast and Ghana, by creating a sustainable condition, can be achieved. The only way to achieve the dream is that stakeholders, starting from the government, industry and processing companies, social and society institutions, to cocoa farmers should build synergy, com-

munication and partnerships.

Based on this, COKELAT compile expert opinions on the implementation and interventions by stakeholders in the cocoa sectors, upstream to downstream, to discuss on how to create a sustainable Indonesian cocoa.

ROLE OF GOVERNMENT INSTITUTIONS: TO PROVIDE REGULATORY AND FACILITATION FUNCTIONS

In general, the role and functions of government institutions is to provide regulation and general facilitation to all stakeholders in the cocoa sector, and to take stand and focus on the welfare of cocoa farmers throughout Indonesia. Given that cocoa is one of the important commodity nationally and globally, the government should play both roles thoroughly and accommodates all interests, especially for small-holders cocoa farmers who mostly rely their life in the plantation sector. One of the regulations issued by the government, i.e. the Ministry of Agriculture, is National Movement of Cocoa Production and Quality Improvement (*Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao*), or GERNAS Kakao, which has been conducted since 2009 until now. At the beginning of its application, this program was targeting on 9 provinces and 40 districts/municipalities of main cocoa producer areas, in which expanded to 14 provinces in 2011. In 2015, the Ministry of Agriculture changed the program name to Sustainable Cocoa Development Program (*Program Pengembangan Kakao Berkelanjutan*).

During the period of 2009-2011, the main activities of GERNAS covered key activities such as Farm Rejuvenation in an area of 70,000 hectares, Farm Rehabilitation covering 235,000 hectares, and Crop Intensification of 145,000 hectares. These three key activities carried out in centers of the major cocoa production in Indonesia. As for *Program Pengembangan Kakao Berkelanjutan* (PPKB), which began its implementation in 2015, covered the areas that have been the center of the national cocoa production that are scattered in Sulawesi, Sumatera, and Nusa Tenggara Timur, which then developed to some other provinces in Indonesia. The aim of the program is how to strive in increas-

ing production and productivity of cocoa from an average of 200 kilograms per hectare to 600 kilograms per harvest, and expected to reach 1.2 tons per hectare, with total intervened land was 1.7 million hectares.

The main activities of Gernas Kakao development program is divided into several sections, namely:

1. Development of Sustainable Cocoa.

Development of "Kakao Rakyat" with resources from state funds by providing the superior quality seeds, fertilizers, and pesticides and herbicides, with activities such as land expansion, replanting, rehabilitation and intensification of crops, intercropping with coconut, farmer empowerment, and quality improvement,

2. Development of Cocoa Revitalization.

Efforts to accelerate the development of small-holders plantation through land expansion, rejuvenation and rehabilitation of the plant with financing through bank credit (KPEN-RP) with interest subsidy from the government,

3. Development of Cocoa and Livestock Integration.

Integration of cocoa farming and livestock through utilization of plant waste (as feed) and cow manure (as fertilizer). These activities include aid to farmers groups in the form of livestock (cow/buffalo/goat) and one set

of waste treatment equipment (chopper and grinding tool for pod husks), and

4. Development through Local State Fund.

Development of cocoa by utilizing funds from provincial and district budget allocation.

Another thing that is emphasized in the implementation of this national program is how the government in carrying out the duties and functions of facilitation to the public, and provide support for the cocoa industries, especially those with direct impacts to the small-scale cocoa farmers.

In the agriculture and plantation sector itself, the meaning and status of the word of sustainable is important, because it concerns the system of livelihood of small-scale cocoa farmers. For the cocoa itself, the government through its programs, such as PPKB for example, has set up budgets and assistance to improve farmers' plantations.

Director of Perennial and Refreshment Crop, the Directorate General of State Crop, Ministry of Agriculture, Dr. Ir. Dwi Praptomo Sudjatmiko, MS. reveals that the cores of the Sustainable Cocoa Development Program are not just doing development in the production sector (upstream), but also to the processing sector (downstream), all of which are

aimed to increase the farmer's income. Another thing that is emphasized by the program is the institutional strengthening and market improvement. And all of these is a series towards sustainable Indonesian cocoa, arguing that if the outreach is only in the upstream sector alone, do not reach out to downstream, it cannot be called sustainable, because only touching a part of it.

In addition to regulation and facilitation provided by the government, the Directorate General of State Crop also provides aid in the form of farming equipments to cocoa farmers group, ranging from land preparation until the processing of cocoa beans with simple technology and in the form of household industry. As for the issue of prices and markets, the government cannot do much because there is no reference of regulations that can be applied and enforced nationally.

As for the issue of health and environmental protection, government has noticed that there is significant issue faced in the field. Most likely, only organic farming systems will be selected and developed by society. The government itself also urge the farmers to use non-chemical pesticides to control pests and diseases. Another way that can be taken is to breed natural enemies, pest traps, and processing of livestock manure into organic fertilizer. All these efforts, in addition to reduce the use of chemical fertilizer, also to increase the production and productivity of cocoa.

The development of the small-scale cocoa farmers cannot be separated from the support of funding from the government, despite the support schemes that seem small. Compared with other commodities, the total budget for the cocoa sector is still quite large, only because it has to cover a large number of locations and more comprehensive program so the number seems small. The problem is that the minimum average period of assistance and the provision of support to farmers is at least 3 years, whereas





the programs were implemented in just a few years and then stopped. Issues of productions in the cocoa plantations will still become an obstacle. Up until now, the yield is still around 800 kilograms per hectare, far behind the target of 1.2 tons per hectare.

The next question then is how a small-scale cocoa farmer are able to achieve these numbers? Inevitably, all stakeholders should collaborate in improving farmers' access to finance, available and affordable agroinputs, and quality planting material. The government should also encourage the extension

staffs in the field to move and be pro-active in helping and encourage the cocoa farmers in resolving the problems faced.

For passion in managing the cocoa plants, especially how to attract the youth to plunge into the plantation sector, is also another challenge faced. Stigma about the plantation and agriculture in rural areas will affect those who want to work in the sector and eventually will choose another path. The government itself has a dream to draw back young people to work in plantation, or farming, by agriculture mechanization and the development of downstream industries.

The end product in the form of food and beverages of chocolate of course still have the prestige for young people if they seriously want to work in this sector. Domestic cocoa processing industry could also be a new light in the resurgence of the cocoa sector. Because in addition to plant and production of cocoa by the communities in their lands, household are also provided with a simple technology of processing cocoa beans to produce more attractive product.



UNIVERSITIES, BEARER OF THE THREE MAIN TASKS IN ACCELERATING THE ACHIEVEMENT OF INDONESIA SUSTAINABLE COCOA

Universities and colleges should have the potential to affect the vast community on the issues of sustainability through some mechanisms. First, the higher education level has always been considered a neutral party because it is a source of multi-disciplinary knowledge. This multi-disciplinary knowledge should always be kept within objective scientific corridor. In addition, the availability of the various disciplines can assist the studies around the issues of the management of sustainable cocoa program, and at the same

time may lead to the problem solving. Not just in terms of some technical manners, but also in terms of social that have not been explored enough so far. Technological factors, both in agriculture and information technology and computer, in this case the advances in digital technology, should be used for the advancement of sustainable cocoa program. Studies on a deeper understanding on the consumer behaviors towards chocolate product can be carried out by the universities.

Secondly, higher education is the central of human resources providers and developers which can be utilized to accelerate the transition of the sustainability practices, particularly in the cocoa

sector. The profile of Y generation students with their typical character that is sensitive to social problems will be able to help accelerating the achievement of Indonesian cocoa sustainability. With the introduction of social entrepreneurship in the subjects, should make sustainability topics become easier to understand and attracting students to contribute. But with the change of orientation of the universities to produce ready-to-work alumnus, require access to train the human resources that can be utilized to accelerate these practices. Several mechanisms such as internships and competition are ways of speeding up the transfer of such expertise. And in terms of the competi-



tion, many world-class universities held a competition of social entrepreneurship to solve the world's problems by exploiting the potential of their students.

And lastly, the role of universities as centers of research and development, can put them as the agent of change through technology assessment and development in both technical and social in order that sustainability problems can be settled immediately.

Ina A. Murwani who is Chairman of the Graduate Program in the Department of Marketing at the School of Business BINUS Nusantara (Binus), Jakarta, in her doctoral candidate dissertation focusing in the field of sustainability manage-

ment, revealed that Sustainability Management or ongoing management is becoming a hot topic in various circles, both businessmen, researchers, governments, nonprofit organizations, and universities. For the agro-food industry itself, the issue of sustainability is critical because interruption in the supply chain of raw materials poseses the greatest risk for businesses in the agricultural sector. The increasing number of middle class in some developing countries such as Indonesia, China and India resulted in increased demand for secondary products that were not previously required. This has led to an increase in demand for raw materials of some plantations commodities, and one of them is cocoa beans.

The Increasing demand for raw materials should become a good news for the cocoa farmers and businessmen in the chocolate manufacturing industry. However, due to the nature of the commodity which is from smallholder farming, supply management has become more complex. In addition to the commodity price factor that fluctuates and influenced by various factors such as weather change, pests, and diseases, to speculation and instability in the producing countries, and also farmers welfare factors also affect the supplies traffic to achieve the required amount.

Several local and multinational companies have allocated budget from their corporate social responsibility program to support sustainability programs related both at regional and global level. In cocoa processing industry, there are several initiatives under different names, all of which leads to the creation and achievement of sustainability programs such as the Sustainable Cocoa Initiative (Mars), Cocoa Life (Mondelez), Cocoa Action (World Cocoa Foundation), Cocoa Sustainable Supply Chain (Cargill), Cocoa Horizons (Barry Callebaut), Cocoa Plan (Nestle), and a few other things which are a similar attempt

were made to improve the sustainable production by increasing production and productivity of smallholders producer. An international agency like ICCO also has initiated a Sustainable Cocoa Economy (2007) and the Government of Indonesia has also commenced National Movement (Gernas) Cocoa (2009, 2015) with the same purpose. For non-profit scope, the establishment of the Cocoa Sustainability Partnership and Sustainable Cocoa Production Program of Swisscontact makes the program implementation in achieving sustainability becomes more apparent.

In terms of cooperation, the cocoa industries already provide positive indicators towards sustainability with clear vision, effective partnership, growing funding, monitoring the progress of social, economic and environmental sustainability. In Indonesia, the publication of the Road Map in 2020 by Cocoa Sustainability Partnership is already a big step in aligning the vision of increasing the productivity of cocoa in Indonesia. Progress of this cooperation still remains to be proven by achieving the target of increasing production and productivity and quality of cocoa beans in 2020.

Sustainability program is not a program that is easy to manage. There are several factors that make this program has enormous difficulties in terms of management, such as (1) The three pillars of sustainability, namely economic, environmental, and social that require specific multidisciplinary knowledge. Not only related to agricultural practice problems, but also knowledge of social, and financial, along with other environmental factors; (2) The availability of skilled human resources; (3) Sustainability program is a type of program that always involves a multi-stakeholder partnership that aligns various parties with all the interests and limitations to reach the same vision thus takes time. In addition to the problem is the possibility of conflict during the course of cooperation adds to the complexity of the governance of sustainability

programs; (4) Cost-effectiveness and efficiency, the amount of financial investment into company's expense and donor agencies have not been tested for its effectiveness. The level of investment for what still can be borne by the owners of capital; (5) An effective scale-up formula and technological factors that may accelerate the transition process of change has not been mapped; and (6) Aligning the changes in consumer preferences of the final product with the success of the availability of adequate supplies have never been reviewed. Consumers are the lifeblood of this chocolate business. Shortages or lack of supplies thereof can make companies lost their customers because of changes in taste preferences and needs. How quick the change of preference compared with the increase in production has never been studied. Knowledge of market movements and the consumer is rarely addressed in sustain-

ability program

SUSTAINABLE COCOA PRODUCTION PROGRAM (SCPP), THE SPEARHEAD TO OUTREACH TO SMALLHOLDERS FARMERS

Swisscontact introduced Sustainable Cocoa Production Program, abbreviated as SCPP, around 2012 that aimed to increase Indonesian cocoa value chain with high competitiveness, and is an example of a development project in public and private partnership. The program is supported and funded by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), the Sustainable Trade Initiative (IDH), Embassy of the Kingdom of the Netherlands, the International Fund for Agricultural Development (IFAD), the Millennium Challenge Account for Indonesia (MCA-I), and several cocoa and chocolate processing private companies and industries.

SCPP was implemented to achieve the

objectives of facilitating capacity building for 130,000 smallholders farmers in 50 districts/cities in 12 provinces which are cocoa production centers. The program itself has completed two of the four phases that are to be implemented in the period 2010-2020.

As a big public-private partnership, this program cooperated with various partners in the private sectors, including BT Cocoa, Barry Callebaut, Cargill, Ecom, JB Cocoa, Mars, Mondelēz International, and Nestlé, to make efforts in improving the economic, social, and environmental aspects within the sustainable cocoa supply chain. The program also is an attempt to build a foundation to improve the transparency and traceability of products in order to encourage sectorial changes.

Dr. Rino A. Sa'danoer, as Head of Program Implementation in this SCPP, explained that the condition of the cocoa sector in Indonesia is now experiencing a



downward trend in production and productivity. And increasing the production and productivity, including the efforts to improve the quality of cocoa beans, is highly dependent on incentives created by the various parties associated with this sector. For example, how the government can issue regulations and policies that favor and support the development in the cocoa sector. And other incentive is price issue. If compared with other alternative crop, the price for cocoa is still much better. If all of these incentives was continuing to support and favor smallholder farmers, then it cannot be denied that they later remain loyal and maintain their cocoa crops.

The thing that needs to have our attention now is whether there are other measures that can make all of these sustain? For example, the price and quality of cocoa beans, the role of government and other community organizations are very important in maintaining these efforts, so that the roles undertaken will provide added value to farmers. Farmers are not only expecting the proceeds from cocoa beans with their best qualities, but they also get additional revenue from the cocoa sector, in addition to the price of course.

Therefore, the parties had to be able to think carefully that if the cocoa farmers can live a decent, healthy, and prosperous life, by only relying on the sales of their cocoa beans, and also whether they are able to support the next generation if they rely on the cocoa sector only. This should be noted further.

In preparation towards sustainable cocoa in Indonesia, Swisscontact through SCPP strives some steps by putting forward 3 aspects. The first aspect is the farmer's economy, how the production, productivity, and quality of cocoa beans are produced, and farmers organizations. The next aspect is the environment with the view that whether a farm or plantation is supporting the livelihoods of cocoa farmers and yet still maintain the existing environment, because this will affect the sustainability element. Lastly, the social



aspects which focuses on aspects of gender equality and youth involvement in the cocoa sector.

For the second phase implementation of the SCPP , in approximately 50 districts/cities in Indonesia, it will be targeting 200,000 farmers until 2020 with the development concentration area is on the island of Sumatra, Sulawesi, Bali, NTB, and NTT. What SCPP does in achieving sustainable cocoa in Indonesia at this time is an attempt to create a vehicle that will take us to the gates of sustainable cocoa. Although initially the program, SCPP is more focusing on how to increase production and productivity, the quality of cocoa beans and cocoa farmers' income.

The biggest obstacle noted in achieving a sustainable Indonesian cocoa is how to prepare people to become professional in the cocoa sector. Although the fruit of the hard work is starting to appears. For example, The increasing of the family income of cocoa farmers because of interventions performed consistently and directed over the years, but the challenge then is how to retain it, especially if for example the intervention program is later completed, whether it will still increase the income of farmers, or even the otherwise.

Support is prepared and provided by the government for this usually is in the form of the distribution of free seeds and fertilizers to farmers' groups in the villages. And as such is not strategic in outreach, because the government only reacted to the problems that exist today. The government should develop more strategies that have impacts and long-term benefits. For example, how to prepare human resources in the cocoa sector, or preparing regulations that are supporting the development of the cocoa sector in Indonesia. Another thing that can be done is that the government may develop a program of incentives to cocoa farmer groups that will attract many other parties, including the possible provision of better infrastructure, and efforts in producing professional farmers.

The point is how to enable cocoa farmers to be more than just as a producer of cocoa beans, but they also play an important role in the cocoa value chain as added value providers. Therefore, organizations that support them should be strengthened, so that farmers have more ability to produce cocoa beans to a further level. ☺



ENSURING COCOA SUSTAINABILITY WITH GRAFTING NURSERY

Thousands of farmers in Southwest Aceh and in surrounding areas can now be relieved. They can top-graft their seedlings and rehabilitate their ageing cacao trees with reliable budwood, sourced from a certified clonal garden maintained by Musliadi and his Mekar farmer group. From June to December 2014, the group has been able to sell 5,000 branches of certified budwood which equals to IDR 120 million.

BETWEEN healthy cacao trees adorned with red pods, a petite but sturdy figure looks busy cutting out cocoa branches from a cacao tree to be made into budwood. His name is Musliadi, a 30-years old cocoa farmer from Pantee Cermin Village in Babahrot Subdistrict, South-

west Aceh, who joined the Swisscontact PEKA (Peningkatan Ekonomi Kakao Aceh) program in 2010.

Through the PEKA project Swisscontact provided Acehnese cocoa farmers with field school training until March 2012. With financial support from the

Swiss Government, Swisscontact continues to help cocoa farmer households in five districts in Aceh, including Southwest Aceh, through an outreach program named Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) for the duration of January 2012 to December 2015.

Back in 2010, Musliadi participated in an intensive 16-days training and attended various modules including good agricultural practices, post-harvest management, and farm rehabilitation. In response, he became a skilled farmer and was motivated afresh to take care of his cocoa farm. "With the know-how I gained

from the field school, I was confident to be able to restore the production of my 0.5 hectare farm. After I applied all recommended techniques to my cacao trees, positive changes could be seen, for example healthy leaves and blossom cocoa flowers that were growing," says Musliadi. Also, he was assigned as the Chairman of the 'Mekar' farmer group, which inevitably made him a role model among his group members.

His success was heard by Musliadi's uncle named Akmansyah who happened to be a government officer at the local Estate Crops Agency (Disbun) and also one of Swisscontact's master trainers in Southwest Aceh. At that time, Akmansyah was aware of the urgency of establishing clonal gardens as a source for reliable budwood to restore the local cocoa production. Akmansyah voluntarily let his two-hectare land to be planted with 1,800 superior cacao seedlings, and asked Musliadi with his tested cocoa cultivation skills to maintain the farm.

Finally in 2011, top-grafted seedlings of superior clones of S1, S2, TSH858 and 45 were replanted, as recommended during field school. The funding of the seedlings was supported by Swisscontact and the local Disbun. With help from Akmansyah and seven members of his farmer group, Musliadi maintained the two-hectare farm accordingly. After 1.5 years, some trees started to produce. Surprisingly, the pods were many, and they were healthy and withstood the pest and diseases, and the cocoa budwood was in high demand. "Honestly, the idea was to only build a clonal garden, but as a result, up to December 2014, six tons of cocoa beans have been produced per annum which equals to IDR 120 million. And from selling 5,000 branches of budwood, we made a total profit of IDR 20 million," elaborates Musliadi proudly.

Witnessing that, Musliadi and Akmansyah, with support from the local Disbun, planned to certify the clonal garden by involving the Indonesian Coffee

and Cocoa Research Institute (ICRCRI) as the national certification agency. During the evaluation, Swisscontact's SCPP field facilitators kept monitoring the development of the garden and provided valuable inputs. After a one-year evaluation process, the clonal garden was finally certified by ICRCRI in June 2014.

Now, farmers in Southwest Aceh and surrounding areas do not have to worry anymore about where to get reliable budwood. The certified clonal garden is ready to meet the demand for budwood from thousands of farmers, including SCPP beneficiaries who come from various districts in Aceh. Besides, this garden can also be used as a plot for farmers

who want to do experiments for a better cocoa production.

Musliadi hopes that his success with this first farmer owned clonal-and-bud-wood garden in Aceh can inspire other farmer groups to build many other clonal gardens, as it is proven that they bring multiple benefits not only for the owner and the maintainer, but also for many other farmers.

"I'd like to thank Swiss-contact for the valuable training and continuous monitoring that brought me closer to my dream of having a wealthy family as a result of our cocoa venture." He said. [SwissContact] ©



BRI SATELLITE EXPANDS SERVICES FOR UMKM (SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND KUR (MICRO CREDIT)



IN effort to polish an increasingly positive performance of bank from year to year, starting in June 2016, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Satellite which named BRIsat will be orbiting in space to reach a quite extensive area. BRI President Director, Asmawi Syam, said in the framework of financial inclusion program and to prepare infrastructure for the ASEAN Economic Community, the BRIsat is a form of

satellite technology development initiatives in order to reach the whole community including customers. In line with this, the bank will also add a network of offices throughout Indonesia, such as in the interior of Papua and Kalimantan and develop electronic banking.

This state-owned bank cooperates with a US satellite manufacturer, Space Systems/Loral, and satellite launcher

company, Arianespace, from France. The satellite program itself initially began around the beginning of 2014 by first applying for orbital slot management of the Ministry of Communications and Information Technology (Kemkominfo) as special host, and then given the orbital slot 150.5 degrees east longitude from 1 September 2015. This BRIsat weighing about 3,500 kg with 45 transponders and reaches parts

of Indonesia, ASEAN, East Asia and parts of the Pacific and Western Australia.

BRI President Director Asmawi Syam further explained that the reason for the development of its own satellite communications network is due to significant growth in financial performance over the last decade in terms of assets, loans, deposits, and profits to shine over the national banking industry. Asmawi calls, asset growth from 2003 through the end of 2013 grew six-fold from Rp 95 trillion to Rp 606 trillion. So the market share increased from 7.8% to 12.24%. And in the credit sector itself, grew 10-fold to Rp 431 trillion from the previous in 2003 amounted to Rp 47 trillion. This makes BRI becomes the main credit distributor nationally with a market share of 13.08% at the end of 2013. And in the same year, the total fund at the end of 2013 grew seven-fold to more than Rp 486 trillion from Rp 76 trillion in 2003, so that the market share of 8.59% increased to 13.27%. "From the profit side, turnover increased from Rp 2.58 trillion to Rp 21.16 trillion or grew eight-fold in the last 10 years. The highest profit among other national banking since 2005," he continued.

While the achievement of Micro Credit (KUR) during 2007-2013 reached Rp 87 trillion with 9.3 million debtors. Until the end of December 2014, BRI has more than 9,800 network offices and 104 thousand e-channels. In addition to that since the last five years, a significant growth requires increased satellite communications network because of differences with China and India, which has a more accessible offices network. Previously, BRI hired a communications network that uses 23 transponders from 9 satellite-based and terrestrial operators.

WHY BRI LAUNCHES BRISAT

As is known, beside Telkom, banks also use satellite services for the transfer of information and data. In addition, transactions made through ATMs, credit and debit cards are also using satellite

services.

1. World's First Bank with Satellite Alone

At the signing of the cooperation between the BRI with Space Systems/Loral of USA and the Arianespace of France in 2014 ago, the government at that time appreciated the business decision made by this state-owned enterprise, and praised the Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) as the first bank in the world which has its own satellite. BRI's corporate action is going to gain attention of the world and will be a historical milestone; BRI becomes the first bank in the world that has its own satellite which is very useful to develop its business.

The hope is that BRI should be the leading bank in micro financing to support the development of micro business, reaching out to the community throughout the country. Community service can be expanded, especially financial inclusion can be realized.

2. Cutting Operational Costs

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) estimates by having its own communication satellite it can save operational costs up to Rp. 600 billion per year. Besides business efficiency, this satellite ownership also aims to improve services to customers. By having its own satellite communications support, it can reduce operating costs for communications. And while operating in the first year could cut cost around Rp. 500 billion to Rp. 600 billion, the durability of the satellite is about 15 years, it can be predicted then how much total savings that can be achieved.

3. No More Offline ATM and Branch Office

It is acknowledged that now banks often get complaints from customers related to information technology-based services. In general, the complaints revolve around the issue of system that often down, or offline, and more time spent by customers at the cashier to wait for the completion of a transaction. It is

not a technology problem from BRI, but its communications capacity which is low or lowered. With the operation of BRI-sat, the 19,000 ATMs and 9,800 branches belonging to BRI will not be disturbed anymore.

4. Leading towards Financial Inclusion

With a satellite that will be launched in France's Arianespace planned on June 17, 2016 Kourou time, Guyana, or June 18, 2016 Indonesian time, it will make this state-owned bank as the leading bank in the expansion of access to financial services communities throughout Indonesia. BRI should be the next bank to achieve financial inclusion and thoroughly distribute micro credit and micro business credit (KUR) so that small and medium enterprises continue to grow and accessible to everyone throughout Indonesia.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) is a bank that focuses on micro, small and medium enterprises (UMKM). BRI believes the presence of communication satellite, BRI-sat, will offer benefits and greater access to banking services for UMKM.

"Not only provide benefits, BRI-sat, that will be launched and orbited on 150.5 degrees East Longitude, 36,000 km above the Papua, is for Indonesia's UMKM" said President Director of Bank BRI, Asmawi Syam. He said that the presence of satellite BRI is good news for UMKM due to increased access to banking services and access to more banking options. Thus, they can enjoy banking services to the maximum. "UMKM sector is the driving force and a pillar of the economy, where over 99% of business entities in Indonesia are UMKM with contribution to forming GDP (gross domestic product) by more than 57%," he explained. If the competitiveness of UMKM increased, further Asmawi, the effect is significant on the national economy. "Of the various aspects that need to be improved to increase the competitiveness of UMKM, is increasing access to capital from banks," said Asmawi. ☺

World Cocoa Foundation: COMMITMENT ON COCOA FARMERS COMMUNITIES

THE World Cocoa Foundation (WCF) is an international membership organization that promotes sustainability in the cocoa sector. WCF provides cocoa farmers with the support they need to grow more quality cocoa and socially and economically strengthen their communities. WCF's members include cocoa and

chocolate manufacturers, processors, supply chain managers, and other companies worldwide, representing a large percentage of the global cocoa market. WCF's programs benefit farmers and their communities in cocoa-growing regions of Africa, Southeast Asia, and the Americas.

WCF was created in 2000 by a group

of chocolate companies who recognized the need to provide cocoa farmers with support to maintain their crop, including techniques to control diseases and pests that attack cocoa trees.

Today WCF implements, manages, and participates in programs at the community level to help independent family



farmers in 15 cocoa-producing nations around the world. WCF programs train farmers to grow more productive cocoa to support a better profit, help farmers establish effective cooperatives and associations for stronger marketing, provide research solutions to reduce crop loss and fight disease, promote the inclusion of other crops on cocoa farms for alternative sources of income and to maintain food security, and expand access to education for youth in cocoa-growing communities.

WCF plays an important role as a convener of stakeholders and facilitating public-private partnerships for cocoa sustainability. To achieve its work, WCF works in partnership with companies, governments, private foundations, international institutions, non-governmental organizations (NGOs), academia, and research institutes globally. Operating in partnership with these entities helps WCF optimize the knowledge and commitment of the partners and maximizes the benefit to farmers and their families.

Research is an important part of WCF's work and a strong contributor to cocoa sustainability. WCF brings researchers together to address critical issues, conserve unique varieties of cocoa, and support fellowships and exchange opportunities in cocoa research. One example is the Cocoa Borlaug Fellowship. The Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Fellowship Program/Global Cocoa Initiative supports the exchange of cocoa scientists from the Americas, Southeast Asia and Africa. The program sponsors Fellows from the science field to complete a two to three-month research Fellowship in the United States, acquiring skills and knowledge that can be shared with their colleagues. This program is supported by WCF and the United States Department of Agriculture/Foreign Agriculture Service.

In the fall of 2015, WCF opened a small office in Makassar, marking the first



step in expanding WCF's presence in the Southeast Asia region.

OVERVIEW OF THE INDONESIAN COCOA APPLIED RESEARCH & EXTENSION GRANT PROGRAM

The Indonesian Cocoa Applied Research & Extension Grant Program builds the capacity of local institutions to address three challenges facing Indonesian cocoa production: managing pests and diseases, aging cocoa farms, and product quality. The project supports the research and technology transfer work to address these challenges in order to improve the quality of life for cocoa-farming families, and the quality of their cocoa production.

With the help of the Ford Foundation, WCF awarded funds to three institutions for four research projects: two with the Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute (ICCR), one with Hasanuddin University, and one with University of Mataram.

Thanks to the Ford Foundation and WCF, these three Indonesian research institutions will contribute greatly to the scientific and technological advancement of cocoa farming and impact widely the communities with which they work. WCF is looking forward to future work and collaboration not only within Indonesia but throughout the Southeast Asia region as well. 

Regional Cocoa Forum Planning Workshop

Bogor, 28-29 January 2016. Based on the results of the internal workshops on October 26, 2015 that discussed the Regional Cocoa Forum, a temporary understanding was achieved regarding what the forum really meant. This meaning becomes important to use as a base for building a common understanding with the Regional Cocoa Forum as a basis to translate it into action plan that can be elaborated especially in the 2016 forum work plan

The achievement gained from the workshop are as follows:

- Lesson-learned sharing about how a forum works by Central Java Economic Resources Development Forum (*Forum Pengembangan Ekonomi Sumber Daya/FPESD*) Central Java, It became a discourse that enriched the understanding of the roles and functions of forum.
- There is a picture of the development of each forum in the past year based on the activities presented by each forum.
- There is understanding and mutual agreement on the functions of the forum namely "as a media for communication, coordination, mediation, advocacy, and sharing of resources between all relevant stakeholders, for the benefit and welfare of farmers and other stakeholders equitably in order to develop a sustainable cocoa".
- Some pointers on forum expectations towards CSP are as follows:
 - Involvement of the forum to the activities of the CSP should be optimized.
 - There should be room for cocoa forum publication in



every national meeting.

- Supporting the arrangement on mechanism and regulation of the organization so that it becomes better.
- MoU between CSP and the work plan is made in the medium or long term (2-3 years).
- CSP can encourage the related parties to make the forum as a strategic partner.
- There is a common issue that was built in concerning certain issues in the cocoa and published nationally.
- CSP could facilitate the forums to be more actively coordinating all stakeholders locally.
- CSP is expected to help the forum so that all stakeholders agreed to join the forum, despite having different backgrounds, but will put those differences aside and work together.
- CSP can help forum to accommodate the different interests of the respective stakeholders at the local level in order to strengthen the role and functions of the forum, which is to coordinate and facilitate the interests of stakeholders and ensure the benefits for all members.
- CSP can support forum so that it can play a role to oversee all government aids addressed to farmers are effective in accordance with its role and functions.
- There is a work plan of each forum with some general feedback in addition to the special input for each forum work plan. The general feedback is as follows:
 - In solving some limitations, the planning needs to be discussed so can be executed effectively by the forum that do not cost more but strategically effective (comprehensive).
 - Farmer's needs are input, know-how, and markets. How can these be solved by the forum to ensure the benefits for farmers.
 - We need to think a strategy on how to disseminate information obtained from the results of discussions at the forum and so forth so that it can help spread the information more widely.
 - There was a notion that the forum discussions be included at Regional Discussion On Development Plan (Musrenbang) strategic issues so that issues regarding cocoa collected by the forum is still under the district's planning and budgeting, on the state level, the forum can attend or involve on the Local Government Development Budget Plan (RAPBD Province) consultation.
 - The teamwork in the forum should be designed in a way that the role of each member can bring the vision and mission of the forum fit to all stakeholders.

- Forum is expected to begin to think towards impact, i.e. increased production at the farm level.
- In planning of budget allocation, all parties that can contribute should be included. It could become a way to measure the forum success.
- Forum could serve as a mediator between program implementers and regulators (could be clarified in planning).
- Forums can invite the House of Representatives (DPRD) to take parts.
- Forum can serve to provide information that can be utilized by all parties.
- If possible, any activities invitation sent by CSP to the cocoa forums should be forwarded to the local government (proposed by Fomakara).
- For local government staff who are participated in CSP activities, no need to be given perdiem, because it has obtained official travel budget from its SKPD.
- Forums enhance its work plan based on the inputs given as described above as an MoU.
- CSP sent a draft of MoU to the forum no later than February 1, 2016.
- Each forum provides input no later than February 5, 2016.
- Representatives of the forum would send framework criteria for CSP activities that can be supported no later than February 5, 2016, and it would be started per March 1, 2016. ☺

As a follow up to the workshop, the recommendations are as follows:

Hearings with Majene District Government and the Cocoa Farmers Forum of Majene District

Majene, February 23, 2016. In accordance with the mandate given to the Executive Office of Cocoa Sustainability Partnership by the Supervisory Board that for 2016, CSP must put the focus and attention at the field level in order to mobilize all the resources and abilities to facilitate cocoa farmers in achieving changes to increase production and the productivity of their cocoa crop.

The event was held in the Regeant Hall of Majene, West Sulawesi and were attended by the SKPD of Majene District such as Bappeda, Assistant III, Department of Agriculture and Forestry, Board of Investment, Industry and Trade, and the Department of Marine and Fisheries, as well as the organization of the CSP's member, Bridgewater and SCPP-Swisscontact and Cocoa Farmers Forum Majene. The meeting produces a description of the extent and potential of the cocoa at one of cocoa producing districts in West Sulawesi, and efforts that could be done by government intervention to increase production and productivity of cocoa.

The event was facilitated by CSP is also used as a chance for dialogue between local governments and related SKPD with the activities implementing organizations, and the farmers of course, so they can obtain information on significant issues around cocoa development program in Majene as well as raising the idea of collaboration between stakeholders to address some of the pressing problems faced by cocoa farmers in the area. This event was also conceived as an attempt to obtain an overview of the implementation of the Sustainable Cocoa Development Program, as well as the preparation of the collabora-



tion program that will be built by the CSP and the Ministry of Agriculture in cocoa economic cluster development in several districts in Indonesia.

Besides that, the visit and an audience with the Regent of Majene, West Sulawesi, and Cocoa Farmers Forum of Majene District is to find out the condition of local cocoa forums in the district/municipal to then re-review their position and is likely to be conducted a capacity building in order to contribute as an organization or a medium for traffic of data and information, and to be the locomotive in the efforts to increase production and productivity of cocoa in the future. ☺

A visit to Nagekeo District, Nusa Tenggara Timur, together with Yayasan Sahabat Cipta

Nagekeo, February 16, 2016. Yayasan Sahabat Cipta (YSC) which is a member of Cocoa Sustainability Partnership located in Nusa Tenggara Timur. In expanding the impact area of intervention program, recently YSC conducts a development approach to groups of farmers in village of Wolokisa, Mauponggo Sub-district, Nagekeo District, Nusa Tenggara Timur.

During a visit to the group of cocoa farmers, the village government were also in attendance to give an idea of the extent, prospects, and problems faced by farmers in the field. People in Wolokisa Village is already familiar with cocoa plants, and become a production center for Nagekeo District. However, crop conditions and declining productivity should become a special attention. Uniquely, this village is unprecedented by intervention program from any party of the cocoa crop sector. These become reasons for the Yayasan Sahabat Cipta to launch initiatives support program for farmers in the region.

The other interesting thing is the support of the village government. For this year, through the budget from Regional



Discussion On Development Plan (Musrenbang), a budget of 50 million Rupiah is prepared for cocoa program that will be used by cocoa farmers in accessing quality planting material. Before that, some farmers from village of Wolokisa had been trained through field schools facilitated by CLC YayasanSahabatCipta in Maumere, Nusa Tenggara Timur. And now, they returned to their village to spread technical knowledge in cocoa crop treatments, in particular how to do the nursery to provide planting materials and entries garden. ☺

Increasing the Reporting Capacity in Cocoa Forum of West Sumatera



Padang, March 17, 2016. As a follow up of the Cocoa Forum Regional Planning Workshop on 28-29 January 2016, CSP will provide support to the Regional Cocoa Forum (FKD) in order to increase synergies and follow up on the policies of the central

government in the cocoa sector and implementation at the regional level. Other needs were deemed important is to increase the capacity of the forum.

As a conceptual thought to facilitate the operational activities of the Memorandum of Understanding that will be ratified, and for the administration tools at regional cocoa forum, the administration should be prepared in several formats as reporting documentation. The formats of the administration are Work Plan, Budget Draft, Administration Financial Management and Activity Narrative Reports. Therefore, in order to ensure that the administration of the appropriate format and can be implemented by the respective Regional Cocoa Forum, then CSP visited Cocoa Forum of West Sumatera in Padang, in order to conduct consultations and trials of administration and as a periodical reporting formats.

The results of the consultation and trial will be refined later and used as a central subject in cocoa forum meeting the day before the General Assembly Meeting next April. Several rec-

ommendations came out of this meeting, among others, that the format of activities and financial administration reporting are discussed and practiced by the secretariat team of Cocoa Forum of West Sumatra, and there are no significant obstacles on the results. For narrative reporting format, simplification is needed without diminishing important information that needs to be reported. As for the agenda of the meeting the day before the GA Meeting next April, it is necessary to discuss on the strategy to enable cocoa forum to be engaged and involved in the decision making process in CSP in order to oversee the action on the ground that the results would become the subject of a presentation at the GA Meeting in order to obtain its approval. For the media and the purpose of publication on Regional Cocoa Forum, CSP need to create a document in booklet that provides information and a general description of Regional Cocoa Forum and distributed to all CSP members and sympathizers in the implementation of the General Assembly Meeting.

Mr. Ishak Mantji, as chairman of the forum, will help simplify the format of the narrative report into a form for easy filling. In the meeting, during a lesson learned sharing session, it was proposed to discuss a result from a regional meeting in Bogor among others is to improve the 2016 forum work plan as the attachment of the MoU, the suitability of budget plan, and formats of attachment required in the MoU; agreeing and designing presentation materials and discussion in the GA meeting pertaining to the existence of cocoa forum and what important things that need to be taken or decided in GA with regard to the existence of a forum to support the program synergies at the field level. The materials of the meeting with the Ministry of Agriculture in the CSP program collaboration need to be socialized to the forum and will become a foundation for the forum in order to perfect their plans. ©

Sharing Learning: Regional Cocoa Forum Activities and Agenda

Makassar, April 4, 2016. As usual, the day before the GA Meeting, the Executive Office of the CSP would bring together all the Regional Cocoa Forums to conduct meeting to share experiences. This event goal is to see the important activities that have been implemented by each forum and agenda of the next action plan for the ongoing 2016 program.

At that one day meeting, representatives from Regional Cocoa Forum from each region are to discuss the follow-up of Regional Cocoa Forum Planning Workshop conducted in Bogor, the discussion of the concept and function of the forum, the action plan is based on functionality, and further talks about Memorandum of Understanding and ancillary documents. In addition, this meeting is also to determine and prepare presentation materials for Regional Cocoa Forum which will be presented at the GA Meeting the next morning.

From the discussion , there are some important things achieved, for example, that the activities planned and carried out by forums may not go out or deviate from the Statute of the CSP; forums are supposed to be the media for CSP to deliver knowledge and information and mediation aspirations of farmers to GA Meeting; forums is not a project implementer but only serve to organize, synergize, collect learning in the field; and so forth.



The core of the efforts that had been done by the CSP together with its member organizations is how to empower the Regional Cocoa Forum so that it can serve as to move the sector in the field by building a collaborative and mutually beneficial cooperation with various stakeholders in the public and private sectors. Another emphasized thing is that in all activities undertaken by the Regional Cocoa Forum, it is not supposed to be disputed or carried by a political interest that can make their position to be no longer neutral for stakeholders in general, and specifically the members of CSP. ©



Definitive 2020 CSP Targets

PRODUCTIVITY

Farmer productivity should be double.

TARGET: Double Productivity.



FARMER OF THE FUTURE

which will make cocoa a profitable business that will attract young generations of cocoa farmers

TARGET: Maintaining an average farmers age-of 40 years old across the sectors



Level of Ambition

PRODUCTION

To make INDONESIA as the NUMBER ONE global producer in a sustainable way.



Objectives of Roadmap 2020

This roadmap constructs pathways towards the improvement of Indonesian cocoa sector in order to enable the cocoa farmers to double their productivity and to provide them competitive benefits. The key is by ensuring the access to the resources that farmers need (Professional Farmers Package) to create professional farmers. The target of this roadmap, moreover, is also to make the cocoa farming becomes more interesting and valuable to the youths.

